

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan wajib dipatuhi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu diatur Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 10. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM.
 11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin hak masyarakat menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu;
 - b. menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan Daerah; dan
 - c. agar tersedianya panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi Kinerja maupun kemampuan anggaran;
 - c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
 - d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana Program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD SPM; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II RAD SPM

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan RAD SPM tahun 2023-2026.
- (2) RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 5

- (1) Sistematika RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
 - BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM dan Permasalahan.
 - BAB V : Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM.
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian secara rinci RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RAD SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan RAD SPM, pemantauan dalam pelaksanaan Program dan evaluasi capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian RAD SPM.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun rencana aksi penerapan SPM. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun rencana aksi penerapan SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target Tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang diterapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara: - 02029'58" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19" sd 115036'19" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak kearah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak 135 Km. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; di sebelah selatan dengan Kabupaten Tapin; di sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru; sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 180.494 Ha memiliki 11 (sebelas) Kecamatan. yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpurn, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan



B. Topografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan Dan Kelurahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah
Menurut Kecamatan

| Kecamatan | Jumlah | | Luas (Km ²) | Persentase |
|---------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|
| | Desa | Kelurahan | | |
| 1. Padang Batung | 17 | - | 203,93 | 11,30 |
| 2. Loksado | 11 | - | 338,89 | 18,78 |
| 3. Telaga Langsung | 11 | - | 58,08 | 3,22 |
| 4. Angkinang | 11 | - | 58,40 | 3,24 |
| 5. Kandangan | 14 | 4 | 106,71 | 5,91 |
| 6. Sungai Raya | 18 | - | 80,96 | 4,49 |
| 7. Simpur | 11 | - | 82,35 | 4,56 |
| 8. Kalumpang | 9 | - | 135,07 | 7,48 |
| 9. Daha Selatan | 16 | - | 322,82 | 17,88 |
| 10. Daha Utara | 19 | - | 268,11 | 14,85 |
| 11. Daha Barat | 7 | - | 149,62 | 8,29 |
| Hulu Sungai Selatan | 144 | 4 | 1.804,94 | 100,00 |

Sumber : BPS Kab. HSS, 2022

Dari sebelas kecamatan yang ada, daerah yang paling luas adalah Kecamatan Loksado dengan luas mencapai 338,89 km² atau 18,78 persen, selanjutnya Kecamatan Daha Selatan 322,82 km² (17,8%), Kecamatan Daha Utara 268,11 km² (14,85%), Kecamatan Padang Batung 203,93 km² (11,30%), sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung yang hanya memiliki luas 58,08 km² atau 3,22 persen luas wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan.

C. Hidrologi

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Sepanjang tahun 2022 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 74,90 persen sampai dengan 83,40 persen. Sedangkan rata-rata suhu udara berkisar antara 27,60°C - 28,90°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2022 disetiap post, hujan paling sering terjadi di bulan Januari, November dan Desember. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan rata-rata suhu terendah sekitar 22,60°C pada bulan Pebruari.

Tabel 1.1
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan 2022

| BULAN | SUHU UDARA | | | KELEMBABAN UDARA | | |
|-----------|------------|-------|-------|------------------|--------|-------|
| | Min | Max | Rata2 | Min | Max | Rata2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Januari | 22,60 | 32,70 | 27,60 | 58,30 | 98,50 | 78,40 |
| Pebruari | 22,90 | 32,70 | 27,80 | 63,30 | 98,00 | 80,60 |
| Maret | 23,40 | 32,90 | 28,20 | 62,00 | 98,50 | 80,30 |
| April | 23,40 | 33,10 | 28,20 | 60,30 | 98,00 | 79,10 |
| Mei | 24,00 | 33,70 | 28,90 | 58,30 | 98,50 | 78,40 |
| Juni | 23,40 | 33,50 | 28,50 | 57,80 | 100,00 | 78,90 |
| Juli | 23,40 | 33,60 | 28,50 | 54,30 | 99,50 | 76,90 |
| Agustus | 22,50 | 34,80 | 28,10 | 51,80 | 98,00 | 74,90 |
| September | 23,30 | 34,00 | 28,60 | 54,80 | 98,50 | 76,60 |
| Oktober | 23,60 | 33,60 | 28,60 | 59,00 | 98,50 | 78,80 |
| November | 23,80 | 33,70 | 28,70 | 56,00 | 98,00 | 77,00 |
| Desember | 23,70 | 33,00 | 28,30 | 68,80 | 98,00 | 83,40 |

Sumber : Kab. HSS dalam Angka, 2022

D. Demografi

Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Hasil Konsolidasi Data dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 243.132 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan. Adapun jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2022

| No. | Kecamatan | Jenis Kelamin | | KK | Total |
|-------|----------------|---------------|-----------|--------|---------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | Sungai Raya | 9.332 | 9.485 | 6.909 | 18.817 |
| 2. | Padang Batung | 11.405 | 11.416 | 8.028 | 22.821 |
| 3. | Telaga Langsat | 5.489 | 5.455 | 3.840 | 10.944 |
| 4. | Angkinang | 10.003 | 9.992 | 6.877 | 19.995 |
| 5. | Kandangan | 25.726 | 26.071 | 18.110 | 51.797 |
| 6. | Simpur | 8.019 | 8.217 | 5.850 | 16.236 |
| 7. | Daha Selatan | 22.308 | 21.560 | 14.132 | 43.868 |
| 8. | Daha Utara | 17.439 | 16.851 | 10.813 | 34.290 |
| 9. | Kalumpang | 3.496 | 3.370 | 2.463 | 6.866 |
| 10. | Loksado | 4.690 | 4.484 | 2.964 | 9.174 |
| 11. | Daha Barat | 4.265 | 4.059 | 2.634 | 8.324 |
| Total | | 122.172 | 120.960 | 82.620 | 243.132 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2022

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari

tahun ketahun mengalami perubahan kenaikan, pada tahun 2014 sebanyak 5.557 jiwa dan tahun 2015 kenaikan sebanyak 3.373 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 data jumlah penduduk 263.107 mengalami penurunan jika dibandingkan data tahun 2015 sebanyak 263.909, menurun sebanyak 802 jiwa. Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 950 jiwa sehingga menjadi 264.057 jiwa. Kemudian untuk Tahun 2018 data kependudukan adalah 240.547, hal ini karena sejak tahun 2018 ada keharusan untuk melihat data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak lagi melihat kepada data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 234.936 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya tahun 2018 240.547 ada penurunan sebesar 5.611. Sebenarnya data jumlah penduduk bukan menurun tetapi karena kegiatan dari Dinas Dukcapil bekerjasama dengan para Kepala Desa/ Lurah mengaktifkan laporan kematian.

Tahun 2020 data jumlah penduduk sebanyak 237.794 orang, bertambah sebesar 2.858 atau 0.98 persen. Pada Tahun 2021 data jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 240.020 jiwa bertambah sebanyak 2.226 atau 0.93 persen. Sedangkan pada Tahun 2022 bertambah sebanyak 3.112 jiwa menjadi 243.132 jiwa penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selengkapnya rincian mengenai perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2022.

E. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

2.2. Indek Pembangunan Manusia

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan maupun penurunan besaran persen dari komponen pembentuk IPM, seperti umur harapan hidup, harapan sekolah, rata-rata lama sekolah atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perubahan dari masing-masing komponen tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Perkembangan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara perlahan bergerak naik mencapai 69,76 di tahun 2022 (masuk dalam kategori sedang), atau meningkat sekitar 0,55 poin dari tahun sebelumnya (69,21). Peningkatan IPM tahun 2022 ini lebih tinggi dari peningkatan IPM tahun 2021 yang meningkat hanya sebesar 0,36 poin.

Gambar 2.1 Perkembangan IPM Kab. HSS dan Prov. Kal-Sel Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. HSS

2.2.1 Angka Kemiskinan

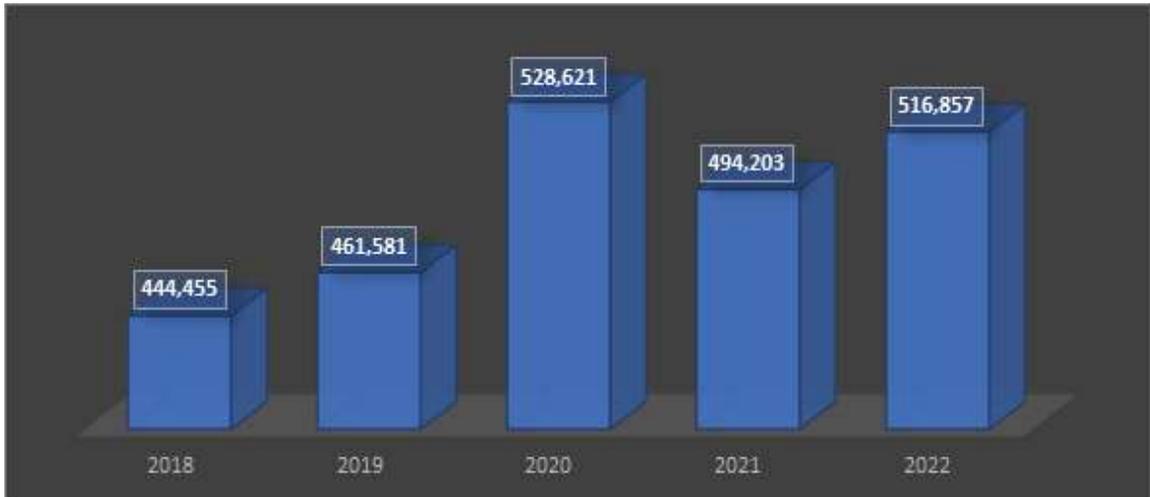
Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs Tujuan pertama SDGs yang berbunyi Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk mempunyai target yaitu sebagai berikut :

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.
3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2022, garis kemiskinan perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 516.857,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya perbulan kurang dari Rp. 516.857,- dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Besaran garis kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Gambar 2.2 Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

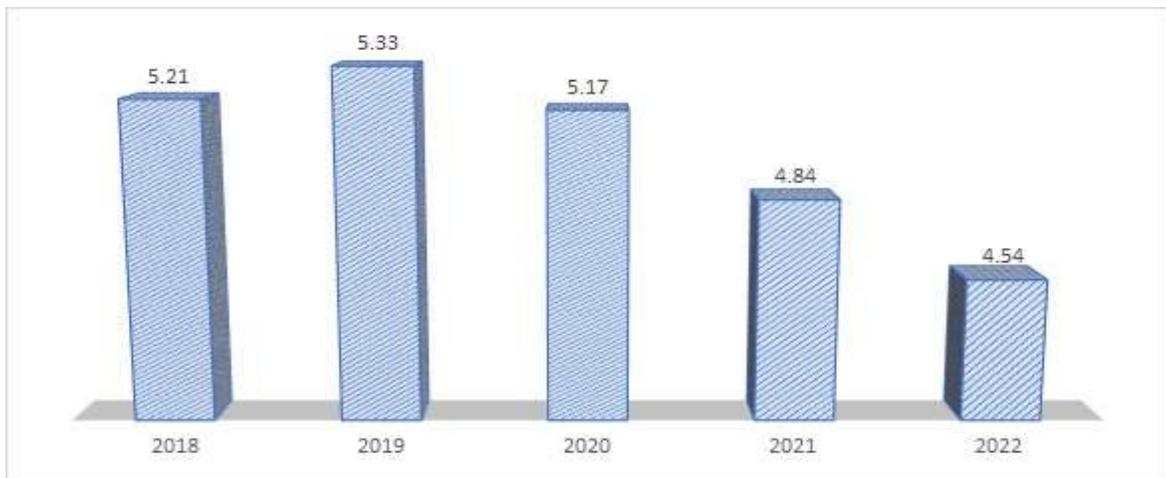
Tahun 2018-2022 (Rp/Kap/Bulan)



Sumber : BPS Kab. HSS

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,800 ribu orang atau sekitar 4,54 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,466 ribu orang atau 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 (%)



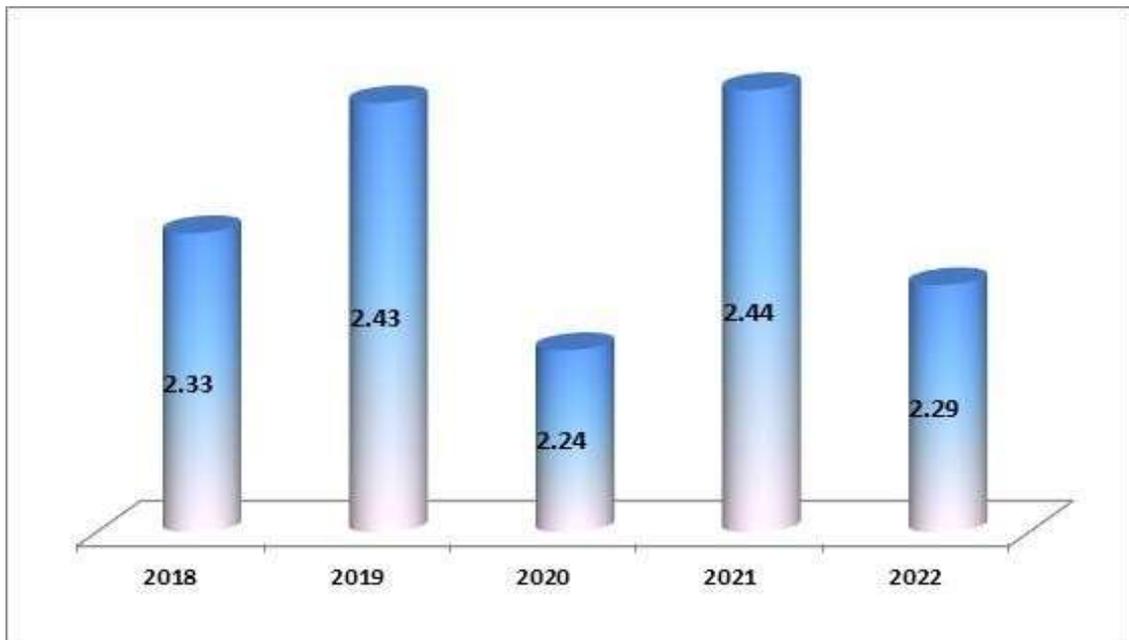
Sumber : BPS Kab. HSS

2.2.2 Angka Pengangguran

TPT (Tingkat pengangguran terbuka). Merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja. TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah 2,29 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 2 orang. Ditengah pemulihan pasca pandemi covid 19 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menurunkan angka pengangguran, hal ini ditunjukkan dengan indikator TPT yang mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 2,44 persen, sebagaimana yang terlampir pada grafik berikut ini.

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. HSS

2.2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian dan merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku (adhb) maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 (adhk), secara agregat menunjukkan perkembangan yang terus meningkat selama periode 2018 – 2022. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan adhb sebesar 8,34 Triliyun rupiah, sementara adhk sebesar 5,04 Triliyun rupiah. Angka yang dicapai pada tahun 2022 ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya. Secara kuantitas, ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mulai meningkat walaupun pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir.

Tabel 2.1

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan dan Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

| Tahun | PDRB Atas Dasar Berlaku | PDRB Atas Dasar Konstan | Pertumbuhan Ekonomi |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2018 | 6.158,26 | 4.470,25 | 6,14 |
| 2019 | 6.555,48 | 4.706,46 | 5,28 |
| 2020 | 6.564,93 | 4.650,23 | -1,19 |
| 2021) | 7.125,71 | 4.844,91 | 4,19 |
| 2022) | 8.349,10 | 5.039,67 | 4,02 |

Sumber : BPS Kab. HSS

*) Angka Sementara

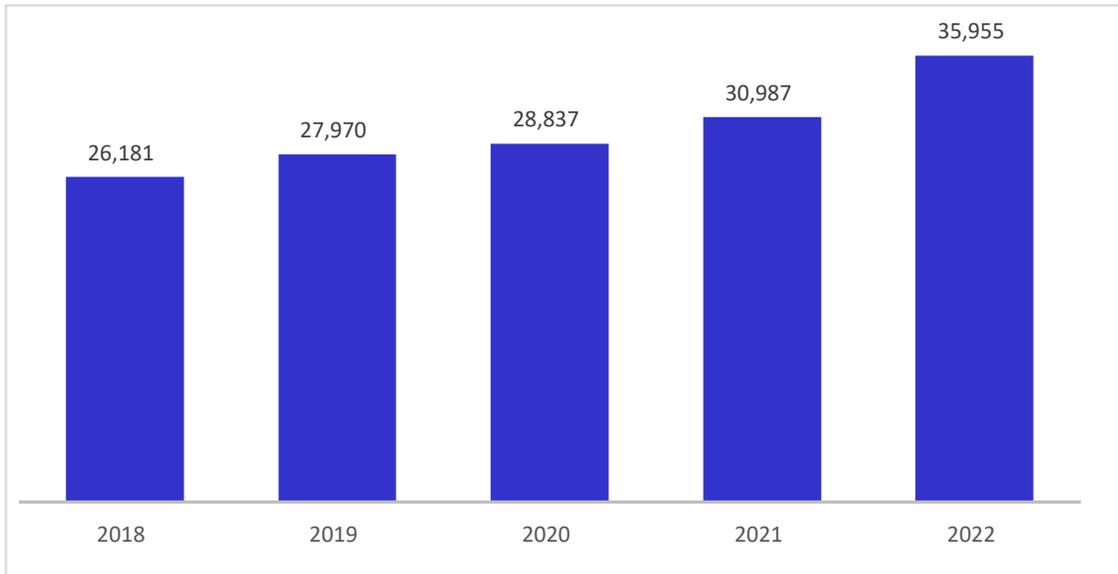
**) Angka Sangat Sementara

2.2.4 Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018– 2022.

Gambar 2.5 PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan

ADHB (ribu rupiah)



Sumber : BPS Kab. HSS

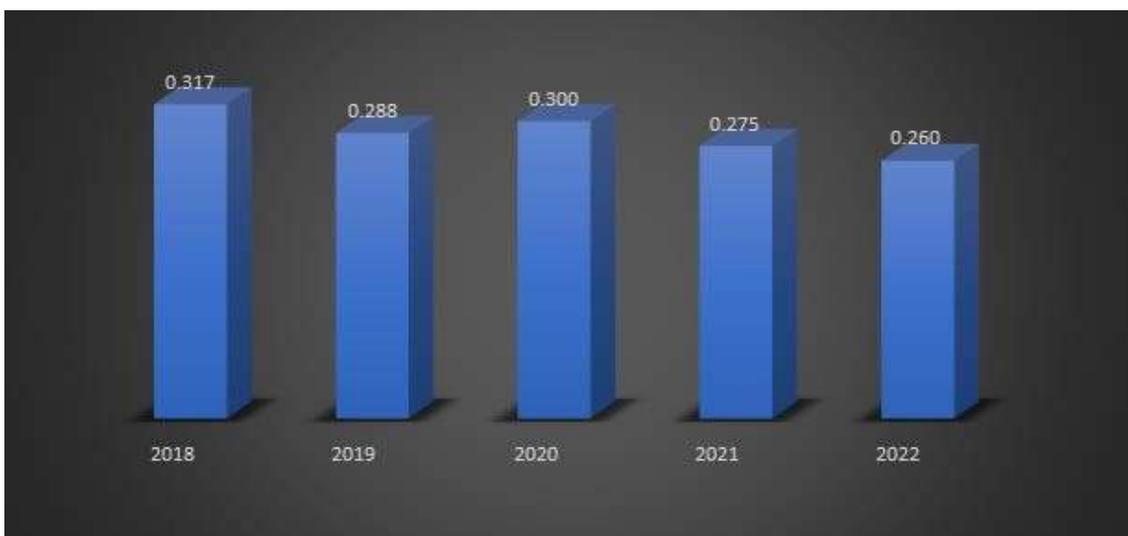
2.2.5 Gini Ratio

Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah gini ratio. Indeks gini adalah ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar nol (pemerataan sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz berada.

Secara umum angka Gini Ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0 < Gini Ratio ≤ 0,35 -----ketimpangan rendah
- 0,35 < Gini Ratio ≤ 0,50 -----ketimpangan sedang
- Gini Ratio > 0,50 -----ketimpangan tinggi

Gambar 2.6 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. HSS

Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius,

dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 gini rasionya sebesar 0,260. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

Capaian Kinerja makro Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Makro Tahun 2022

| NO | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | 69,21 | 69,76 | 0,79 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 4,84 | 4,54 | (6,20) |
| 3 | Angka Pengangguran | 2,44 | 2,29 | (6,15) |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,18 | 4,02 | (3,83) |
| 5 | Pendapatan Perkapita | 30.987 | 35.955 | 16,03 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,275 | 0,260 | (5,45) |

F. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM-nya) oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari:

A. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 meliputi :

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar
3. Pemenuhan SPM urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

1.1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2.1 Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar urusan Pendidikan, meliputi :

- 1). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

| No. | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|-----|---|
| 1. | Buku gambar |
| 2. | Alat mewarnai |
| 3. | Penyediaan biaya personil Peserta Didik |
| 4. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 5. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |

2). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi :

| No | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|----|---|
| 1. | Buku teks pelajaran |
| 2. | Perlengkapan belajar |
| 3. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 4. | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat |
| 5. | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan |
| 6. | Penyediaan biaya personil peserta didik |
| 7. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 8. | Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C |

3). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

| No | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|----|---|
| 1. | Modul belajar |
| 2. | Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| 3. | Penyediaan biaya personil peserta didik |
| 4. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 5. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 6. | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat |
| 7. | Perlengkapan belajar |
| 8. | PKBM Terakreditasi minimal C |

2.2 Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan telah ditentukan (lihat tabel 4.1) yaitu :

Tabel 4.1
Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|---------------------------|---|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | | 7.087 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|-----------------------|--|---|--------------------|
| | | PAUD | | |
| | | | Buku gambar | 7.087 |
| | | | Alat mewarnai | 7.087 |
| | | | Penyediaan biaya personil Peserta Didik | 7.087 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 299 |
| | | | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 800 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | 23.274 |
| | | | Buku teks pelajaran | 23,274 |
| | | | Perlengkapan belajar | 23,274 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 252 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 11 |
| | | | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 1,708 |
| | | | Penyediaan biaya personil peserta didik | 23,274 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|-----------------------|--|---|--------------------|
| | | | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 1,909 |
| | | | Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 252 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | 4,837 |
| | | | Modul belajar | 4,837 |
| | | | Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 106 |
| | | | Penyediaan biaya personil peserta didik | 4,837 |
| | | | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 247 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 15 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang | 15 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | berkualifikasi SMA/ sederajat | |
| | | | Perlengkapan belajar | 4,837 |
| | | | PKBM Terakreditasi minimal C | 15 |

2 Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 4.4
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | Pernyataan Standar |
|----|--|---------------------------------|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | Ibu hamil | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Ibu bersalin | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Bayi baru lahir | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Balita | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan | Anak pada usia pendidikan dasar | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendasarkan skrining |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | Pernyataan Standar |
|----|--|---|--|
| | dasar | | kesehatan sesuai standar |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun | Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas | Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Penderita hipertensi | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Penderita Diabetes Melitus | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Orang dengan TB | Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) | Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) | Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar |

2. Mutu Layanan Dasar

Mutu layanan dasar standar pelayanan minimal urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | 1) Standar Kuantitas : Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) ; a. Satu kali pada trimester pertama. b. Satu kali pada trimester kedua. c. Dua kali pada trimester ketiga 2) Standar Kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi: Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Lingkar lengan Atas (LILA), Pengukuran Tinggi Fundus Uteri, Penentuan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin, Pemberian Imunisasi sesuai dengan status Imunisasi, Pemberian Tablet Tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksanaan/Penanganan Kasus dan Temu wicara (konseling) |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Sesuai standar pelayanan persalinan 1) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar : - Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan - Tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang 2) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal : 1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. -Standar kualitas : 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemotongan dan perawatan tali pusat ▪ Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ▪ Injeksi vitamin K1 ▪ Pemberian salep/tetes mata antibiotic ▪ Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM ▪ Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | <p>Sesuai standar pelayanan kesehatan balita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan - menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang <p>a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun dan Pemberian imunisasi dasar lengkap.</p> <p>b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun dan Pemberian Imunisasi Lanjutan.</p> <p>c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun dan Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</p> <p>d) Edukasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | <p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. <p>Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali</p> |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|--|--|
| | | dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah (putus sekolah) |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif - Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut - Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a). Pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasiitas layanan kesehatan, edukasi Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan bila di perlukan b). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c). Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d). Melakukan rujukan jika diperlukan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|--|--|
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Sesuai standar pelayanan kesehatan terduga TB -Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) | -Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining - Kelompok orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu : Ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, Penjaja Seks, LSL, Transgender/Waria, pengguna Napza Suntik dan Warga binanaan Pemasarakatan |

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

A. Jenis Pelayanan Dasar

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam Permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Target pencapaian SPM Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait sektor air limbah domestik adalah :

- 1) Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman.
- 2) Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :

- Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
- Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun 2022 sebesar 100%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2022 terkait Sektor Air Limbah domestik adalah universal akses air limbah domestik sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik baik berupa on site maupun off site sistem.

Perumahan rakyat ditinjau dari persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya. Jika dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, setiap tahunnya didominasi oleh rumah milik sendiri meskipun jumlahnya fluktuatif yaitu pada tahun 2015 sebesar 62,47%, kemudian menurun di tahun 2016 sebesar 56,85% dan kembali meningkat tahun 2018 sebesar 59,33%. Rumah tangga yang kontrak/sewa pada tahun 2015 sebesar 25,31% kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 dengan persentase yang sama yaitu 33,27%. Sementara untuk rumah tangga yang bebas sewa pada tahun 2015 sebesar 10,6% kemudian menurun pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah yang sama yaitu 7,76%.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah dinas/lainnya termasuk yang sangat kecil yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,62% kemudian meningkat tahun 2016 sebesar 2,12%, namun mengalami penurunan tahun 2017 sebesar 0,33%.

Selain kepemilikan rumah, perumahan rakyat juga perlu ditinjau dari jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih. Pada tahun 2015 jumlah akses air bersih sebesar 41.424 rumah tangga, sementara tahun 2016 tidak ada rumah tangga yang mengakses air bersih, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 359.036 rumah tangga telah mengakses air bersih. Jika dipersentasakan, akses air bersih dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 90%. Sementara itu banyaknya rumah tangga yang telah berlangganan listrik sebanyak 53.189 rumah tangga atau sekitar 63,27% dari total keseluruhan pelanggan listrik.

4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan untuk juknis ke lima jenis pelayanan tersebut adalah :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.
- Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Meliputi :
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 2. penyusunan kajian risiko bencana Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
 3. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 5. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 6. pembuatan rencana kontinjensi;
 7. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 8. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 9. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 10. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 12. respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabahzoonosis prioritas;
 13. respon cepat darurat bencana;
 14. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 15. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 16. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

B.Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada table berikut :

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 480 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan |

| | | |
|--|--|--|
| | 1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 1 |
| | 2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 1 |
| | 3 . Standar operasional prosedur Satpol PP | 6 |
| | 4 . Standar sarana prasarana Satpol PP | 44 |
| | 5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | 78 |
| | 6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 1 |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | |
| 1 . | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 1 |
| | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 1 |
| | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | 4 |
| | 4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana | 1 |
| | 5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana | 178,628 |
| 2 . | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana | 43 |
| | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | 4 |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total |
| | | Yang Harus Dilayani |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | 38 |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 3 |
| | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 38 |
| | 3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana | 38 |
| | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas | 2 |
| | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 38 |
| 1 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | Jumlah Total |
| | | Yang Harus Dilayani |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | | 42 |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi | 28 |

| | | |
|--|---|----|
| | 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 2 |
| | 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 32 |
| | 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia | 10 |

6 Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/

suami dan anaknya.

3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS dan DTKS;

Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi
Tahun 2022

| No | Jenis PMKS | Data Eksisting Tahun 2022 | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Disabilitas Terlantar | 297 | |
| 2 | Anak Terlantar | 744 | |
| 3 | Lansia Terlantar | 948 | |
| 4 | Gelandangan dan Pengemis | 40 | |
| 5 | Data Korban Bencana | 350 | |

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.HSS

Tabel 4.25
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / |
|----|---------------------------------------|------------------------|
|----|---------------------------------------|------------------------|

| | | Output |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | |
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 297 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 297 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | 4 . Penyediaan permakanan | 297 |
| | 5 . Penyediaan sandang | 7 |
| | 6 . Penyediaan alat bantu | 77 |
| | 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 80 |
| | 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 29 |
| | 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar | 297 |
| | 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 297 |
| | 11 . Akses ke layanan pendidikan | 74 |
| | 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 9 |
| | 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 9 |
| | 14 . Layanan rujukan | 9 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | JUMLAH | 1,485 |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 744 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 744 |
| | 2 . Penyediaan permakanan | 20 |
| | 3 . Penyediaan sandang | 10 |
| | 4 . Penyediaan alat bantu | 10 |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 744 |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 20 |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar | 20 |
| | 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 744 |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan | 744 |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 10 |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 10 |
| | 12 . Layanan rujukan | 20 |
| | 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | JUMLAH | 3,099 |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA | Jumlah Total |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| | LAYANAN DASAR (80%) | Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 948 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 948 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 948 |
| | 4 . Penyediaan sandang | 205 |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 51 |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 5 |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 848 |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 848 |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 948 |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 948 |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 3 |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 3 |
| | 13 . Layanan rujukan | 5 |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | JUMLAH | 5,763 |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 40 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 40 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 40 |
| | 4 . Penyediaan sandang | 40 |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 40 |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 40 |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 70 |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar | 40 |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak | 110 |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 23 |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 40 |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 40 |
| | 13 . Layanan rujukan | 11 |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | JUMLAH | 537 |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | Ya Terjadi Bencana |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 350 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Penyediaan permakanaan | 350 |
| | 2 . Penyediaan sandang | 350 |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 167 |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | 350 |

BAB III
KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2021-2025. RAD SPM disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) dari masing-masing Pemerintah daerah. RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

A. KEBIJAKAN UMUM

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.10 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

| Pilar-Pilar Visi | Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD |
|---|--|
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan | Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama |

| Pilar-Pilar Visi | Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD |
|--|--|
| | <p>diupayakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas |
| <p>Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan</p> | <p>Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura, 2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan, 3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p> |
| <p>Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)</p> | <p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).</p> |
| <p>Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong</p> | <p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> |

| Pilar-Pilar Visi | Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD |
|------------------|--|
| | <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p> <p>Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p> |

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

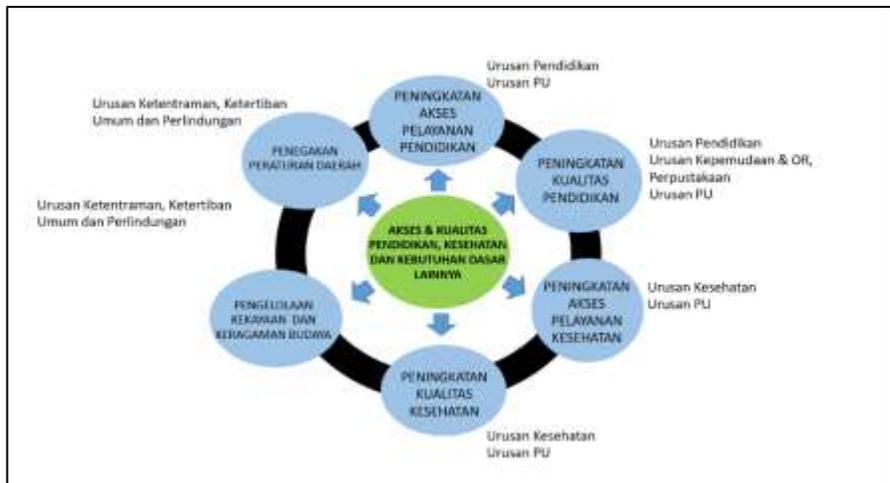
Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut.

Gambar 1.3
Logicframe Perencanaan Misi 1

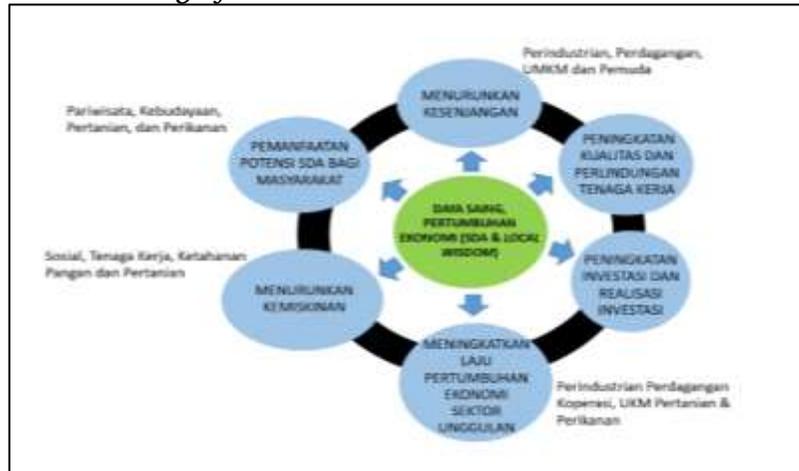


Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian misi ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-2 sebagai berikut.

Gambar 1.4
Logicframe Perencanaan Misi 2

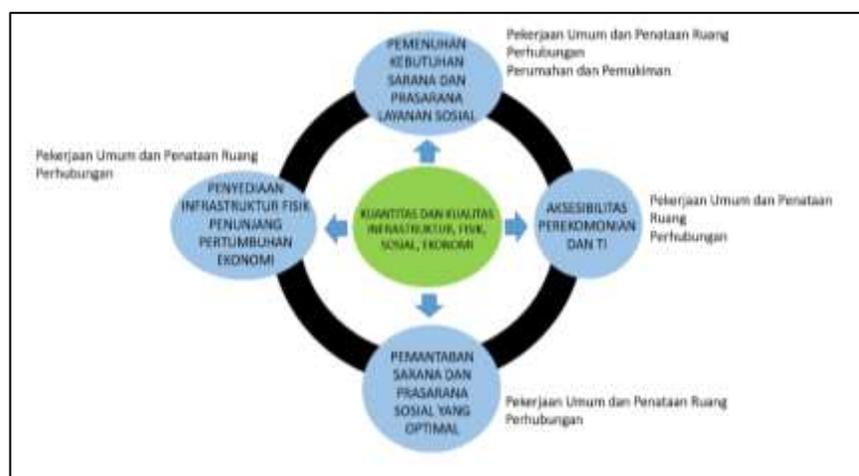


Misi 3: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagai berikut.

Gambar 1.5
Logicframe Perencanaan Misi 3



Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

Dalam upaya pencapaian misi ke-4 maka dirumuskan perencanaan

terintegratif dalam langkah pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 1.6
Logicframe Perencanaan Misi 4



Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.

Gambar 1.7
Logicframe Perencanaan Misi 5



Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib :
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 1. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 3. Penguatan UMKM dan koperasi.
- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 4. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.

Gambar 1.8
Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi



3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, yang mengacu pada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta didasarkan pada issue-isue dan analisis strategik yang mampu mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;

4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
 5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.
- Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.9 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1



Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan:

1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.10
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2



Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.11
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3



Dalam rangka pencapaian misi Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

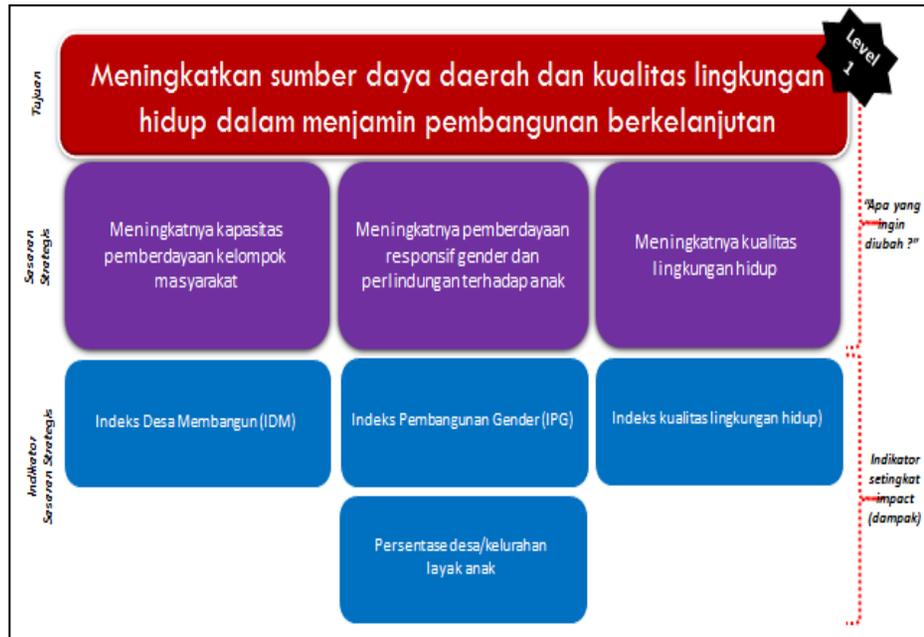
Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical*

Framework Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.12
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4



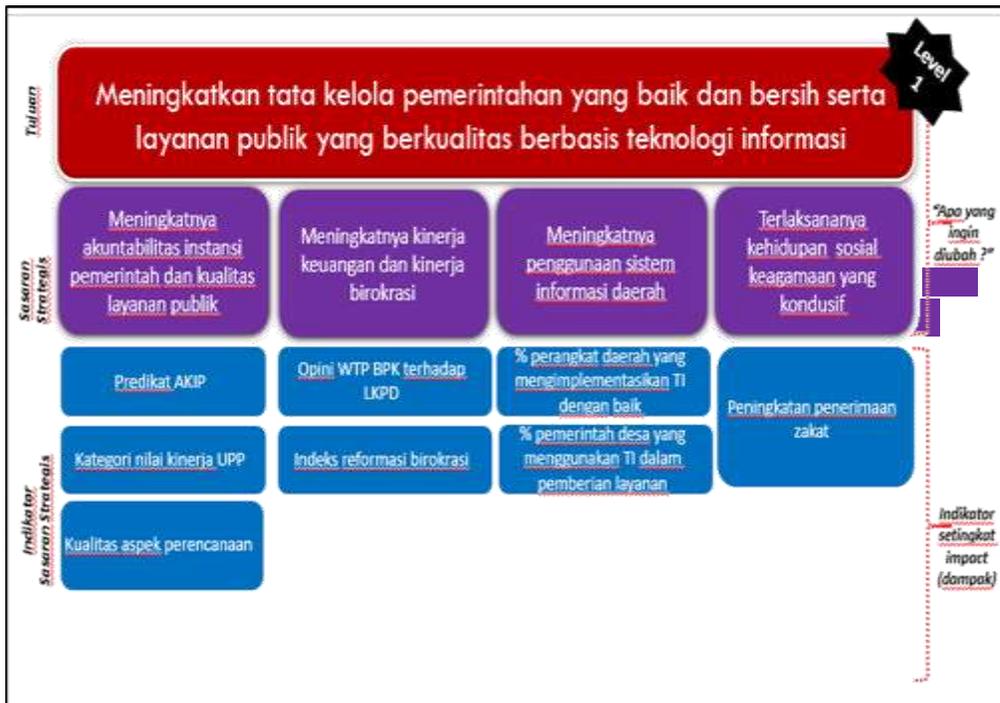
Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.13
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5



Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

A. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri, yang mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala Daerah terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, atau kedalam arah kebijakan maupun strategi. Jika janji dari Kepala Daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan maupun strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.14
Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah



Berdasarkan penjelasan diatas, dan ilustrasi yang digambarkan diatas maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11 Penjabaran Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

| | | |
|--------|---|--|
| MISI 1 | Beasiswa bagi pelajar dan santri berprestasi kuliah di dalam dan ke luar negeri | Hibah/Bansos |
| | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah | Program Peningkatan Mutu PAUD |
| | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar |
| | | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| | | Bansos/ *level arah kebijakan* |
| | Generasi muda dan pelajar HSS bebas narkoba | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat |
| | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |
| | | Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasyarakatan Olahraga |
| | BPJS semesta untuk semua warga | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat |
| | | *level arah kebijakan* |
| MISI 2 | CINTA Berwirausaha | Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja |
| | | Program Peningkatan Mutu Produk Industri |
| | Resi Gudang | Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan |
| | | Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan |
| | Asuransi bagi petani dan nelayan yang berpotensi gagal panen | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan |
| | | Program Peningkatan |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | Pertanian Organik | Kesejahteraan Petani |
| | | Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat |
| | | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan |
| | | Program Peningkatan Produksi Holtikultura |
| MISI 3 | Islamic Center | Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan |
| | | Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik |
| | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman |
| | Bantuan sarana dan prasarana untuk pesantren dan pendidikan negeri/ swasta | *Level Arah Kebijakan* |
| | | Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik |
| | | *Level Arah Kebijakan* |
| Feri Penyeberangan | *Level Arah Kebijakan* | |
| MISI 4 | Hijau Desaku | Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar |
| | | Program Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Sehat |
| | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| | APBDes | |
| BUMDes untuk peningkatan ekonomi desa | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | |
| MISI 5 | Aghniya (Hartawan) untuk HSS yang lebih baik | APBDes |
| | | *Level Arah Kebijakan* |

Melalui arah kebijakan diperoleh instrumen berupa program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Arah kebijakan diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka

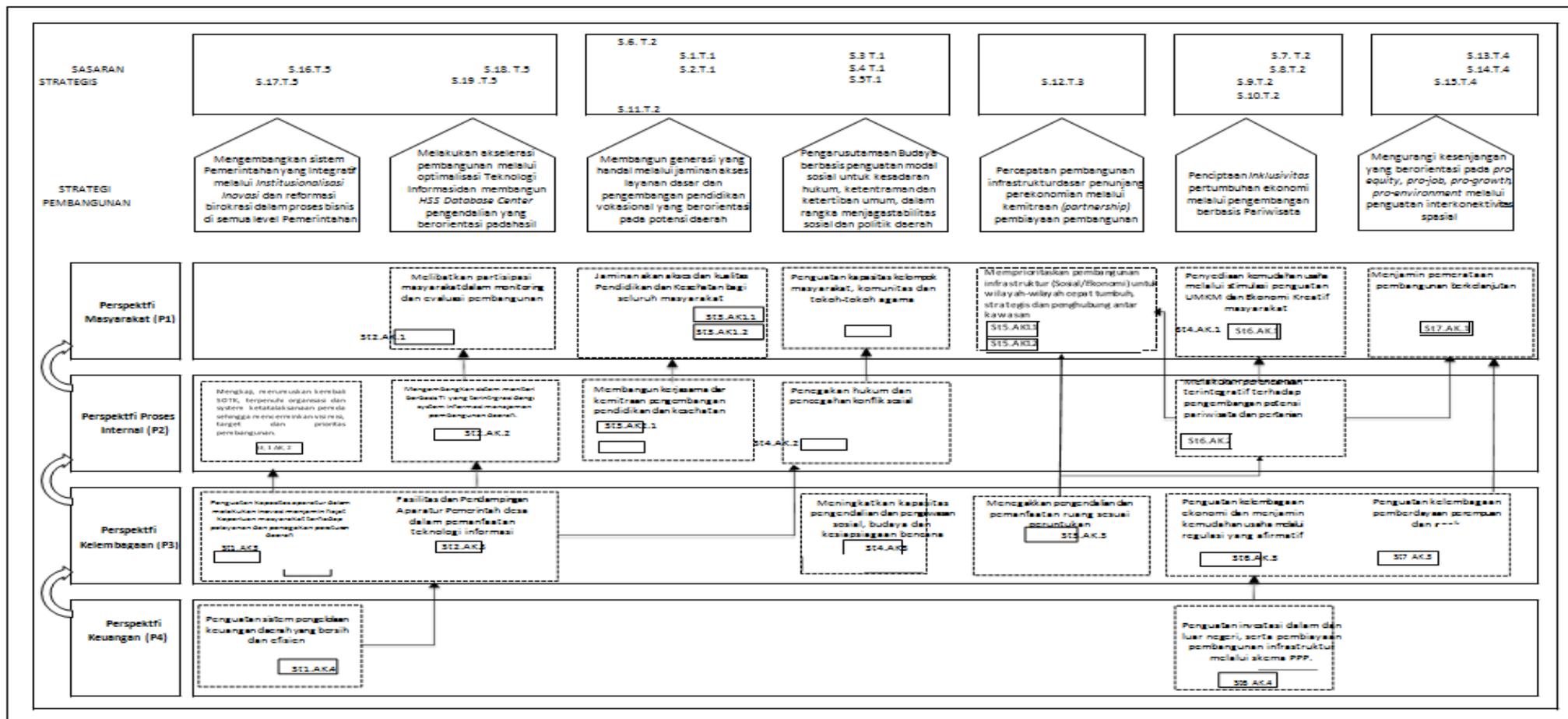
program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

Setiap strategi mengandung berbagai program yang inherent dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata di tiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indicators dan leading indicators. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (outcome measures) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (performance drivers).

Penetapan program dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD).

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur berfikir dari masing- masing strategi yang dirumuskan kedalam arah kebijakan serta program prioritas, yang di rangkum dalam arsitektur-arsitektur pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023. Adapun arsitektur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 1.15 Arsitektur Pemetaan Strategi Dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar 6. : Arsitektur Pemetaan Strategi dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 1.12 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG | | |
|--|---|---|---|--|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|-------------------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya | 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | Indeks | 67,80 | 68,41 | 69,41 | 70,25 | 71,08 | 71,86 | 72,57 | 72,57 | Disdik | |
| | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan | 1 | Harapan lama sekolah | Tahun | 12.05 | 12.07 | 12.70 | 12.89 | 13.08 | 13.29 | 13.52 | | 13.52 |
| | | | 2 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 7.71 | 7.72 | 8.00 | 8.17 | 8.33 | 8.44 | 8.53 | | 8.53 |
| | | | 3 | Persentase PAUD formal terakreditasi A | Persen | 1.25 | 1.25 | 2,50 | 4,37 | 6,87 | 9,37 | 12,50 | | 12,50 |
| | 4 | | Persentase satuan pendidikan terakreditasi A | Persen | 4,76 | 4,76 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 15,02 | 15,02 | | |
| | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan | 5 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 65,39 | 65,59 | 66,05 | 66,54 | 67,04 | 67,51 | 67,87 | 67,87 | Dinkes | |
| | | 6 | Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun | Persen | 75.81 | 74.57 | 73.02 | 72.18 | 71.35 | 70.51 | 69.68 | 69.68 | Dinas PPKBPP & PA | |
| | | 7 | Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) | Predikat | belum diukur | A | AA | AA | AA | AAA | AAA | AAA | RSUD Hasan Basry | |
| 8 | | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna | Persen | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 13.04 | 17.39 | 17.39 | Dinas Kesehatan/UP T RS Daha Sejahtera/RSU D Hasan Basry | | |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------|--|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|-------|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | 3 | Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman | 9 | PPH Ketersediaan | Skor | 83,19 | 83,77 | 84,61 | 85,46 | 86,31 | 87,17 | 88,04 | 88,04 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 4 | Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat | 10 | Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM | Persen | 52,00 | 54,00 | 57,00 | 61,00 | 67,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | Disdik/Dinkes /Dinsos/Satpol PP/BPBD Kesbangpol/Dis.PUTR/Dis.PR LH |
| | | 5 | Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat | 11 | Persentase angka PMKS yang mandiri | Persen | 63,87 | 64,62 | 65,76 | 68,94 | 71,19 | 73,65 | 76,35 | 76,35 | Dinsos |
| Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan | | 2. Tingkat kemiskinan | | | Persen | 5,80 | 5,21 | 5,14 | 5,06 | 4,80 | 4,54 | 4,28 | 4,28 | |
| | | 6 | Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah | 12 | Tingkat kemiskinan | Persen | 5,80 | 5,21 | 5,14 | 5,06 | 4,80 | 4,54 | 4,28 | 4,28 | Dinsos |
| | | | | 13 | Indeks Gini | Indeks | 0,336 | 0,317 | 0,318 | 0,312 | 0,308 | 0,299 | 0,284 | 0,284 | Dis TK, Kop dan UKP |
| | | 7 | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | 14 | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 2,02 | 2,43 | 2,07 | 2,04 | 1,96 | 1,99 | 1,86 | 1,86 | |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG |
|--------|---|----------------------------------|--|--------|----------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | 3. Laju pertumbuhan ekonomi | | Persen | 6,12 | 6,14 | 6,23 | 6,28 | 6,33 | 6,38 | 6,43 | 6,43 | |
| 8 | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | 15 | Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan | Persen | 5,85 | 4,55 | 4,47 | 4,98 | 5,27 | 5,56 | 5,85 | 5,85 | Dis TK, Kop dan UKP |
| | | 16 | Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | Persen | 5,28 | 4,84 | 5,38 | 5,50 | 5,61 | 5,72 | 5,83 | 5,83 | Disdag |
| | | 17 | Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | 1,67 | 4,33 | 4,28 | 4,51 | 4,86 | 4,92 | 5,63 | 5,63 | Distan/Diskan |
| | | 18 | Persentase koperasi sehat | Persen | 1,18 | 1,76 | 2,35 | 3,18 | 3,82 | 4,46 | 5,10 | 5,10 | Dis TK, Kop dan UKP |
| 9 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 19 | Peningkatan retribusi dan pajak daerah | Rupiah | 21,10 Milyar | 22,50 Milyar | 23 Milyar | 24 Milyar | 25 Milyar | 26 Milyar | 28 Milyar | 28 Milyar | Bakeuda |
| 10 | Meningkatnya investasi PMDN | 20 | Persentase peningkatan Penanaman Modal | Persen | 3,00 | 4,20 | 4,80 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | Dis PMPTSP |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG | | |
|---|--|--|---------------------|--|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | Dalam Negeri (PMDN) | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat | 21 | Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>) | Rupiah | 3.223.750.000 | 3.904.175.000 | 4.224.480.000 | 5.374.026.000 | 6.687.744.000 | 7.873.326.000 | 9.073.800.000 | 9.073.800.000 | Disporapar |
| Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | 4. Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | Persen | | | 67,49 | 71,35 | 49,64 | 51,00 | 50,38 | 51,31 | 50,90 | 50,90 | |
| | 12 | Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | 22 | Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥40 Km/jam | Persen | 74.00 | 74.50 | 62,45 | 63,60 | 64,75 | 65,80 | 67,00 | 67,00 | DisPUTR |
| | | | 23 | Persentase kinerja sistem jaringan irigasi | Persen | 80.00 | 85.00 | 62,68 | 65,60 | 67,35 | 69,10 | 71,43 | 71,43 | |
| | | | 24 | Persentase kecukupan sarana dan prasarana public | Persen | 10 | 14 | 24 | 48 | 67 | 86 | 100 | 100 | |
| | | | 25 | Persentase kecukupan RTH public | Persen | 24.82 | 24.83 | 24.84 | 24.85 | 24.86 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | Dispera KPLH |
| | | | 26 | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas | Persen | 40.16 | 40.66 | 53.05 | 59.98 | 67.43 | 74.88 | 82.32 | 82.32 | |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG |
|--|--|---|--------|----------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan | 5. Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | |
| | 13 Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat | 27 Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | Dis.PMD |
| | 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | Indeks | 89,07 | 89,96 | 90,27 | 90,58 | 90,81 | 90,91 | 91,27 | 91,27 | |
| | 14 Meningkatkan pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak | 28 Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 89,07 | 89,96 | 90,27 | 90,58 | 90,81 | 90,91 | 91,27 | 91,27 | DPPKBPPA |
| | | 29 Persentase desa/kelurahan layak anak | Persen | 0,68 | 0,68 | 2,03 | 3,38 | 4,73 | 6,08 | 7,43 | 7,43 | |
| | 7. Indeks kualitas lingkungan hidup | | Indeks | 54,55 | 54,94 | 55,08 | 55,27 | 55,44 | 55,6 | 55,77 | 55,77 | |
| | 15 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 30 Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks | 54,55 | 54,94 | 55,08 | 55,27 | 55,44 | 55,60 | 55,77 | 55,77 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis | | | | | | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA RPJMD | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD 2023 | PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG | | | |
|--------|---|---|--|----------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|-------|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | |
| 5 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi | 8. Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 62,93 | 63,88 | 68 | 72 | 78 | 83 | 88 | 88 | | | | |
| | | 16 | Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik | 31 Predikat AKIP | Predikat | BB | BB | BB | A | A | A | A | A | Seluruh SKPD | |
| | | | | 32 | Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) | Predikat | B | B | A | A | A | A | A | Setda (Bag. Orpad) / Disdukcatpil/ Dinkes/RSUD HHB/RSU Daha Sejahtera/Dis. PMPTSP | |
| | | Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi | Nilai | 33 | Kualitas aspek perencanaan | Nilai | 53,33 | 56,81 | 60,28 | 62,82 | 63,81 | 65,45 | 67,09 | Bappelitbang da | |
| | | | | 34 | Opini WTP BPK terhadap LKPD | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Inspektorat | |
| | | | | 35 | Indeks profesionalisme ASN | Indeks | 48,63 | 49,04 | 69,77 | 73,17 | 74,42 | 78,12 | 81,33 | 81,33 | BKD |
| | | 18 | Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah | 36 | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik | Persen | 7,89 | 7,89 | 13.16 | 39.47 | 65.79 | 92.11 | 100 | 100 | Diskominfo |
| | | | | 37 | Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan | Persen | 0.60 | 0.60 | 8.33 | 15.97 | 23.61 | 31.25 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| | | 19 | Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan | 38 | Persentase peningkatan penerimaan zakat | Persen | 7 | 7,5 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | Koordinasi Setda Bag. Kesra dengan Baznas Kab. HSS |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud ancar-ancar kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan ancar-ancar jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas I.

Tabel 1.13
Pagu Indikatif Program Prioritas I

| Prioritas | Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| Prioritas I | 480.665.367 .544 | 494.321.149 .168 | 488.508.716 .589 | 475.750.163 .150 | 470.342.927 .893 |

Sumber : Hasil dan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Prioritas I, sebagai berikut :

Tabel 1.14
Nama Program Prioritas I dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|---|-----------------|
| 1 | Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini | 4.794.000.000 |
| 2 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini | 2.642.895.000 |
| 3 | Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat | 5.800.000.000 |
| 4 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat | 8.618.875.000 |
| 5 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar | 39.047.873.000 |
| 6 | Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.800.000.000 |
| 7 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 15.386.980.000 |
| 8 | Program Peningkatan Budaya Baca | 1.939.250.000 |
| 9 | Program Peningkatan Akses Perpustakaan | 1.951.376.250 |
| 10 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 314.051.000 |
| 11 | Program Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin, Nifas, Dan Anak | 2.195.000.000 |
| 12 | Program Peningkatan Kesehatan Keluarga | 10.036.204.000 |
| 13 | Program Peningkatan Akses Sarana Dan Prasarana Kesehatan | 11.454.953.675 |
| 14 | Program Peningkatan Mutu Sarana Dan Prasarana Kesehatan | 24.702.571.325 |
| 15 | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 151.633.072.000 |
| 16 | Program Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit | 722.385.800 |
| 17 | Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 22.613.612.500 |
| 18 | Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan | 212.025.477.000 |
| 19 | Program Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit | 76.793.868.565 |
| 20 | Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Dan Jaringannya | 163.953.776.220 |
| 21 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD) | 435.506.547.208 |
| 22 | Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat | 814.022.500 |

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|---|-----------------|
| 23 | Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan | 3.345.690.000 |
| 24 | Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 2.950.731.000 |
| 25 | Program Peningkatan Akses Dan Mutu Air Bersih | 35.454.967.500 |
| 26 | Program Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase | 44.041.923.005 |
| 27 | Program Penegakan Peraturan Daerah | 430.150.000 |
| 28 | Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bencana | 689.400.000 |
| 29 | Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana | 505.750.000 |
| 30 | Program Peningkatan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 679.850.000 |
| 31 | Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) | 1.996.682.500 |
| 32 | Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 31.912.070.000 |
| 33 | Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja | 994.471.250 |
| 34 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 68.756.250 |
| 35 | Program Peningkatan Mutu Produk Industri | 944.850.000 |
| 36 | Program Pengembangan Sentra Industri | 9.200.000.000 |
| 37 | Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan | 4.085.490.000 |
| 38 | Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan | 7.924.915.000 |
| 39 | Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan | 25.536.350.000 |
| 40 | Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan | 2.518.005.000 |
| 41 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 2.035.547.500 |
| 42 | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | 1.920.877.500 |
| 43 | Program Peningkatan Populasi Ternak | 6.477.840.000 |
| 44 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1.357.574.900 |
| 45 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian | 311.000.000 |
| 46 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 3.834.900.000 |
| 47 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 7.904.470.000 |
| 48 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan | 82.758.000 |
| 49 | Program Peningkatan Kualitas Koperasi | 1.114.361.000 |
| 50 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan PAD Dan Dana Perimbangan | 1.947.865.000 |
| 51 | Program Peningkatan Pengelolaan PBB Dan BPHTB | 3.606.675.000 |
| 52 | Program Peningkatan Realisasi Investasi | 620.565.000 |
| 53 | Program Penguatan Iklim Investasi | 2.102.055.000 |
| 54 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 14.150.415.000 |
| 55 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 3.617.170.000 |
| 56 | Program Pengembangan Kemitraan | 4.816.595.000 |
| 57 | Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya | 7.927.370.000 |
| 58 | Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan | 37.986.571.500 |
| 59 | Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 42.178.173.475 |
| 60 | Program Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan | 236.658.979.900 |
| 61 | Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan | 143.848.835.000 |

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|--|-----------------|
| | Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya | |
| 62 | Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Lainnya | 19.336.250.000 |
| 63 | Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik | 284.258.975.000 |
| 64 | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | 34.814.402.500 |
| 65 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman | 17.619.755.000 |
| 66 | Program Penataan Dan Penguasaan Tanah | 54.516.500.000 |
| 67 | Program Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Sehat | 75.333.630.000 |
| 68 | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.006.377.500 |
| 69 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | 195.825.000 |
| 70 | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | 192.487.500 |
| 71 | Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan | 50.225.000 |
| 72 | Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 463.621.500 |
| 73 | Program Peningkatan Pelindungan Anak | 119.830.000 |
| 74 | Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup | 11.017.391.000 |
| 75 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 34.123.930.000 |
| 76 | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah | 1.278.656.300 |
| 77 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3.114.475.000 |
| 78 | Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur | 79.325.000 |
| 79 | Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 1.970.584.250 |
| 80 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1.428.579.500 |
| 81 | Program Peningkatan Pelayanan Perijinan | 835.375.000 |
| 82 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik | 85.126.698.180 |
| 83 | Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan | 8.589.025.000 |
| 84 | Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil | 985.050.000 |
| 85 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | 5.443.370.000 |
| 86 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.811.150.000 |
| 87 | Program Pengendalian Pembangunan Daerah | 536.800.000 |
| 88 | Program Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.314.100.000 |
| 89 | Program Perencanaan Pembangunan Sektoral | 1.453.550.000 |
| 90 | Program Penelitian Dan Pengembangan | 4.038.125.000 |
| 91 | Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang | 3.895.650.000 |
| 92 | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah | 1.220.190.000 |
| 93 | Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 15.482.375.000 |

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|-----|---|-------------------|
| 94 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 6.042.925.000 |
| 95 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 18.103.401.600 |
| 96 | Program Pembinaan Disiplin Aparatur | 585.315.000 |
| 97 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawain | 3.116.972.000 |
| 98 | Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah | 737.063.750 |
| 99 | Program Pemanfaatan Teknologi Informasi | 12.250.350.000 |
| 100 | Program Pembinaan Dan Pelayanan Pemerintahan Desa | 1.104.185.000 |
| 10 | Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan | 4.908.050.000 |
| | Jumlah | 2.409.588.324.344 |

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas II.

Tabel 1.15
Pagu Indikatif Program Prioritas II

| Prioritas | Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| Prioritas II | 36.850.484.975 | 33.976.355.725 | 33.976.355.725 | 33.976.355.725 | 35.030.272.525 |

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Prioritas II, sebagai berikut:

Tabel 1.16
Nama Program Prioritas II dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|---|----------------|
| 1 | Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar | 5.026.750.000 |
| 2 | Program Promosi kesehatan | 581.162.500 |
| 3 | Program Pembinaan Jasa Kontruksi | 374.806.250 |
| 4 | Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 383.000.000 |
| 5 | Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat | 3.601.959.750 |

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|--|-----------------|
| 6 | Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan | 1.055.705.500 |
| 7 | Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan | 1.229.890.000 |
| 8 | Program Peningkatan Keluarga Sejahtera | 315.043.250 |
| 9 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 4.322.720.000 |
| 10 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau | 362.979.700 |
| 11 | Program Pelayanan Informasi dan Media Massa | 21.746.100.000 |
| 12 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 2.398.405.000 |
| 13 | Program Peningkatan Prestasi dan Per masyarakatan Olahraga | 4.764.078.750 |
| 14 | Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah | 500.725.000 |
| 15 | Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah | 1.657.934.000 |
| 16 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 139.500.000 |
| 17 | Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak | 311.000.000 |
| 18 | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | 201.279.200 |
| 19 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat | 29.261.651.000 |
| 20 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 1.374.140.625 |
| 21 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1.580.500.000 |
| 22 | Program Peningkatan Pelayanan Perundang - Undangan dan Hubungan Masyarakat | 2.279.425.000 |
| 23 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan | 96.207.800.000 |
| 24 | Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan | 3.455.224.800 |
| 25 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati | 3.975.000.000 |
| 26 | Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah | 11.598.712.500 |
| 27 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 7.492.968.000 |
| 28 | Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan | 568.125.000 |
| 29 | Program Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah | 62.250.000,00 |
| 30 | Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah | 2.352.620.000 |
| 31 | Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik | 561.975.000 |
| 32 | Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah | 290.500.000 |
| | Jumlah | 170.886.441.525 |

Program Prioritas III merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas III berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan

layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas III:

Tabel 1.17
Pagu Indikatif Program Prioritas III

| Prioritas | Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| Prioritas III | 105.639.289.870 | 99.054.147.120 | 99.054.147.120 | 99.054.147.120 | 99.054.147.120 |

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya Program Prioritas III, sebagai berikut:

Tabel 1.18
Nama Program Prioritas III dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

| No | Nama Program | Pagu Indikatif |
|----|---|-----------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 284.250.9634.45 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 108.755.971.805 |
| 3 | Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | 102.263.800.350 |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Daha Sejahtera | 6.212.383.375 |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Daha Sejahtera | 372.759.375 |
| | Jumlah | 501.855.878.350 |

Pembangunan pada tahun 2022 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema *“Memantapkan Pemulihan Ekonomi & Sosial yang Berkontribusi terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan Memperhatikan Lingkungan.”*

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mengacu dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD pada tahun direncanakan. Sehingga perlu untuk mengetahui tingkat konsistensi antara program RPJMD dengan Program pada RKPD. Perumusan konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang juga berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Pada Bab ini secara eksplisit menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai

kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut:

Tabel 1.19
Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk dana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

| NO. | NAMA SKPD | JUMLAH PAGU |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 274.140.923.914,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 145.744.555.455,00 |
| 3 | RSUD Brigjen H. Hasan Basry | 218.443.985.941,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 102.575.652.709,00 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 41.781.128.409,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9.895.324.544,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.272.032.076,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 32.416.861.919,00 |
| 9 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.103.160.696,00 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | 5.468.416.950,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.962.250.375,00 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.899.142.896,00 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 5.899.397.303,00 |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 11.512.345.000,00 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian | 6.030.391.469,00 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.142.205.863,00 |
| 17 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 33.679.518.073,00 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6.210.295.048,00 |
| 19 | Dinas Perikanan | 5.854.071.839,00 |
| 20 | Dinas Pertanian | 22.315.445.230,00 |

| NO. | NAMA SKPD | JUMLAH PAGU |
|--------|--|--------------------------|
| 21 | Dinas Perdagangan | 9.286.803.800,00 |
| 22 | Sekretariat Daerah | 44.261.698.730,00 |
| 23 | Sekretariat DPRD | 47.013.821.750,00 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 6.500.052.075,00 |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 229.682.307.295,00 |
| 26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 16.822.646.340,00 |
| 27 | Inspektorat | 10.836.696.792,00 |
| 28 | Kecamatan Sungai Raya | 2.246.207.506,00 |
| 29 | Kecamatan Padang Batung | 2.962.425.107,00 |
| 30 | Kecamatan Telaga Langsat | 2.595.592.333,00 |
| 31 | Kecamatan Angkinang | 2.830.945.678,00 |
| 32 | Kecamatan Kandangan | 11.912.759.292,00 |
| 33 | Kecamatan Simpur | 3.252.060.750,00 |
| 34 | Kecamatan Daha Selatan | 3.075.624.360,00 |
| 35 | Kecamatan Daha Utara | 2.766.017.700,00 |
| 36 | Kecamatan Kalumpang | 2.857.242.120,00 |
| 37 | Kecamatan Loksado | 2.698.471.440,00 |
| 38 | Kecamatan Daha Barat | 2.167.879.900,00 |
| 39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.353.445.439,00 |
| 40 | RS Daha Sejahtera | 11.275.972.616,00 |
| JUMLAH | | 1.365.745.776.732,0 0 |

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 2021

Tabel 1.20
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan

Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Daerah

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--------|---|----------------------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | | RSUD Hasan Basry |
| | | 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 4 | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 5 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 6 | Program Perlindungan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 7 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 8 | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas PPKBPPPA |
| | | 9 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 10 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 11 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Porapar |
| | | 12 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Porapar |
| | | 13 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 14 | Program Pengembangan Sumber Daya | BKPSDM | | |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 1 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | | 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | | 3 | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Dukcapil |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|----|---|----------------------------------|
| | | 4 | Program Pencatatan Sipil | Dinas Dukcapil |
| | | 5 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Dukcapil |
| | | 6 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas PMD |
| | | 7 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo |
| | | 8 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Kominfo |
| | | 9 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 10 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Kominfo |
| | | 11 | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 12 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Semua Kecamatan |
| | | 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Semua Kecamatan |
| | | 14 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semua Kecamatan |
| | | 15 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Semua Kecamatan |
| | | 16 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Semua Kecamatan |
| | | 17 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | 18 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | 19 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | 20 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | | 21 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------------------------|----|--|----------------------|
| | | 22 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 23 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 24 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 25 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKPD |
| | | 26 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKPD |
| | | 27 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKPD |
| | | 28 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kesbangpol |
| | | 29 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kesbangpol |
| | | 30 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesbangpol |
| | | 31 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kesbangpol |
| | | 32 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kesbangpol |
| | | 33 | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| 3 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang | 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | 2 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga | Dinas Nakerkop, UKMP |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | Berkualitas dan Inklusif | | Kerja | |
| 4 | | Program Hubungan Industrial | Dinas Nakerkop, UKMP | |
| 5 | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Nakerkop, UKMP | |
| 6 | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | |
| 7 | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas PMD | |
| 8 | | Program Peningkatan Kerja sama Desa | Dinas PMD | |
| 9 | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP | Dinas Nakerkop, UKMP | |
| 10 | | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Dinas Nakerkop, UKMP | |
| 11 | | Program Pengembangan UMKM | Dinas Nakerkop, UKMP | |
| 12 | | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP | |
| 13 | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas PMPTSP | |
| 14 | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 15 | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 16 | | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 17 | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan | |
| 18 | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan | |
| 19 | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan | |
| 20 | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Porapar | |
| 21 | | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Porapar | |
| 22 | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Pertanian | |
| 23 | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan | Dinas Pertanian | |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|----|---|----------------------|
| | | | Masyarakat Veteriner | |
| | | 24 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 25 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 26 | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perdagangan |
| | | 27 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Perdagangan |
| | | 28 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Perdagangan |
| | | 29 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Dinas Perdagangan |
| | | 30 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 31 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| 4 | Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUTR |
| | | 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR |
| | | 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas PUTR |
| | | 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUTR |
| | | 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUTR |
| | | 6 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas PUTR |
| | | 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| | | 8 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas PUTR |
| | | 9 | Program Pengembangan Perumahan | Dispera, KPLH |
| | | 10 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dispera, KPLH |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|----|--|------------------------|
| | | 11 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Dispera, KPLH |
| | | 12 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 13 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Dispera, KPLH |
| | | 14 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | 15 | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| | | 16 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 1 | Program Pengelolaan Persampahan | Dispera, KPLH |
| | | 2 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dispera, KPLH |
| | | 3 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 4 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 5 | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dispera, KPLH |
| | | 6 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Dispera, KPLH |
| | | 7 | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan, 2021

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi:

Tabel 1.21
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|---|---------------------------------|
| 1 | Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata | 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | 2 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 4 | Program Hubungan Industrial | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 5 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 6 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 7 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas PMD |
| | | 8 | Program Peningkatan Kerja sama Desa | Dinas PMD |
| | | 9 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 10 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 11 | Program Pengembangan UMKM | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 12 | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 13 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 14 | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 15 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 16 | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 17 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan |
| | | 18 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | 19 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | 20 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Porapar |
| | | 21 | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Porapar |
| | | 22 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 23 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Pertanian |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----|---|----------------------------------|
| | | 24 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 25 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 26 | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perdagangan |
| | | 27 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Perdagangan |
| | | 28 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Perdagangan |
| | | 29 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Dinas Perdagangan |
| | | 30 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 31 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 32 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 33 | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 34 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 35 | Program Perlindungan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 36 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 37 | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas PPKBPPPA |
| | | 38 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 39 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 40 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Porapar |
| | | 41 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Porapar |
| | | 42 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 43 | Program Pengembangan Sumber Daya | BKPSDM |
| 2 | Memperkuat Sarana | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUTR |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|---|---------------------------------|
| | Prasarana Dasar dan Perekonomian | 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR |
| | | 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas PUTR |
| | | 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUTR |
| | | 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUTR |
| | | 6 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas PUTR |
| | | 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| | | 8 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas PUTR |
| | | 9 | Program Pengembangan Perumahan | Dispera, KPLH |
| | | 10 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dispera, KPLH |
| | | 11 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Dispera, KPLH |
| | | 12 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 13 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Dispera, KPLH |
| | | 14 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | 15 | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| | | 16 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | 3 | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 1 |
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| 3 | Program Pendaftaran Penduduk | | | Dinas Dukcapil |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------------|----|--|----------------------------------|
| | | 4 | Program Pencatatan Sipil | Dinas Dukcapil |
| | | 5 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Dukcapil |
| | | 6 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas PMD |
| | | 7 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo |
| | | 8 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Kominfo |
| | | 9 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 10 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Kominfo |
| | | 11 | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Semua Kecamatan |
| | | 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Semua Kecamatan |
| | | 3 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semua Kecamatan |
| | | 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Semua Kecamatan |
| | | 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Semua Kecamatan |
| | | 6 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | 7 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | 8 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | | 10 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | | 11 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 12 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|--|----------------------|
| | | 13 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 14 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKPD |
| | | 15 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKPD |
| | | 16 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKPD |
| | | 17 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kesbangpol |
| | | 18 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kesbangpol |
| | | 19 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesbangpol |
| | | 20 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kesbangpol |
| | | 21 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kesbangpol |
| | | 22 | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Ketahanan Bencana | 1 | Program Pengelolaan Persampahan | Dispera, KPLH |
| | | 2 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dispera, KPLH |
| | | 3 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 4 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 5 | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dispera, KPLH |
| | | 6 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan | Dispera, KPLH |

| NO | PRIORITAS DAERAH | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|----|--------------------------------|----------------------|
| | | | Hidup | |
| | | 7 | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional:

Tabel 1.22

Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional

| N O | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|----|---|------------------------|
| 1 | PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | 2 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 4 | Program Hubungan Industrial | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 5 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 6 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 7 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas PMD |
| | | 8 | Program Peningkatan Kerja sama Desa | Dinas PMD |
| | | 9 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 10 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 11 | Program Pengembangan UMKM | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 12 | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 13 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 14 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan |
| | | 15 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | 16 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | 17 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Porapar |
| | | 18 | Program Pemasaran | Dinas Porapar |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|---|---------------------------------|
| | | | Pariwisata | |
| | | 19 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 20 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Pertanian |
| | | 21 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 22 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 23 | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perdagangan |
| | | 24 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Perdagangan |
| | | 25 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Perdagangan |
| | | 26 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Dinas Perdagangan |
| | | 27 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| | | 28 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Nakerkop, UKMP |
| 2 | PN 3 Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Hasan Basry |
| | | 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 5 | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 7 | Program Perlindungan Perempuan | Dinas PPKBPPPA |
| | | 8 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Dinas PPKBPPPA |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------|----|---|----------------------------------|
| | | 9 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Porapar |
| | | 10 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Porapar |
| | | 11 | Program Pengembangan Sumber Daya | BKPSDM |
| | | 12 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | | 13 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | | 14 | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Dukcapil |
| | | 15 | Program Pencatatan Sipil | Dinas Dukcapil |
| | | 16 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Dukcapil |
| | | 17 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas PMD |
| | | 18 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo |
| | | 19 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas PMPTSP |
| | | 20 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Dinas Kominfo |
| | | 21 | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 22 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Semua Kecamatan |
| | | 23 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semua Kecamatan |
| | | 24 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Semua Kecamatan |
| | | 25 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Semua Kecamatan |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|--|----------------------------------|
| | | 26 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | 27 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | 28 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | 29 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | | 30 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | | 31 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 32 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 33 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bappelitbangda |
| | | 34 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKPD |
| | | 35 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKPD |
| | | 36 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKPD |
| | | 37 | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| 3 | PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 3 | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 4 | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas PPKBPPPA |
| | | 5 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 6 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Dinas PPKBPPPA |
| | | 7 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | 8 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kesbangpol |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|----|---|------------------------|
| | | 9 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kesbangpol |
| 4 | PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUTR |
| | | 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR |
| | | 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas PUTR |
| | | 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUTR |
| | | 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUTR |
| | | 6 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas PUTR |
| | | 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| | | 8 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas PUTR |
| | | 9 | Program Pengembangan Perumahan | Dispera, KPLH |
| | | 10 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dispera, KPLH |
| | | 11 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Dispera, KPLH |
| | | 12 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 13 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Dispera, KPLH |
| | | 14 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | 15 | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| | | 16 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PROGRAM PRIORITAS DAERAH | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----|--|----------------------|
| 5 | PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 1 | Program Pengelolaan Persampahan | Dispera, KPLH |
| | | 2 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dispera, KPLH |
| | | 3 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 4 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dispera, KPLH |
| | | 5 | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dispera, KPLH |
| | | 6 | Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup | Dispera, KPLH |
| | | 7 | Program Penanggulangan Bencana | BPB, Kesbangpol |
| 6 | PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 1 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Kominfo |
| | | 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Semua Kecamatan |
| | | 3 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kesbangpol |
| | | 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesbangpol |
| | | 5 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kesbangpol |

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Program Prioritas Pemenuhan SPM

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas 6 Jenis Pelayanan Dasar (6 SPM) sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Bidang Urusan Sosial.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM-nya) oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 4) Pendidikan Anak Usia Dini
- 5) Pendidikan Dasar
- 6) Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 meliputi :

4. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar
5. Mutu Pelayanan Dasar
6. Pemenuhan SPM urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

1.1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

d. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- e. Pendidikan Dasar, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- f. Pendidikan Kesetaraan
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2.2 Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar urusan Pendidikan, meliputi :

- 1). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

| No. | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|-----|---|
| 1. | Buku gambar |
| 2. | Alat mewarnai |
| 3. | Penyediaan biaya personil Peserta Didik |
| 4. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 5. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |

- 2). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi :

| No | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|----|---|
| 1. | Buku teks pelajaran |
| 2. | Perlengkapan belajar |
| 3. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 4. | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat |
| 5. | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan |
| 6. | Penyediaan biaya personil peserta didik |
| 7. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 8. | Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C |

- 3). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

| No | Kualitas Barang dan atau Jasa |
|----|---|
| 1. | Modul belajar |
| 2. | Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| 3. | Penyediaan biaya personil peserta didik |
| 4. | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV |
| 5. | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV |

| | |
|----|---|
| 6. | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat |
| 7. | Perlengkapan belajar |
| 8. | PKBM Terakreditasi minimal C |

2.2 Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan telah ditentukan (lihat tabel 4.1) yaitu :

Tabel 4.1
Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|---|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | | 7.087 |
| | | | Buku gambar | 7.087 |
| | | | Alat mewarnai | 7.087 |
| | | | Penyediaan biaya personil Peserta Didik | 7.087 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 299 |
| | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 800 | | |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | 23.274 |
| | | | Buku teks pelajaran | 23,274 |
| | | | Perlengkapan belajar | 23,274 |
| | | | Kualitas tenaga | 252 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|-----------------------|---|---|--------------------|
| | | | kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 11 |
| | | | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 1,708 |
| | | | Penyediaan biaya personil peserta didik | 23,274 |
| | | | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 1,909 |
| | | | Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 252 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | 4,837 |
| | | | Modul belajar | 4,837 |
| | | | Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat | 106 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Mutu Pelayanan | Target Capaian SPM |
|----|-----------------------|----------------------|---|--------------------|
| | | | (PKBM) | |
| | | | Penyediaan biaya personil peserta didik | 4,837 |
| | | | Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 247 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 15 |
| | | | Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 15 |
| | | | Perlengkapan belajar | 4,837 |
| | | | PKBM Terakreditasi minimal C | 15 |

4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada table berikut:

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | TUNTAS MADYA | | | 98,27% |
| 1 . | Pendidikan Dasar Usia Dini | | | | 96.57 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 7,087 | 7,087 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 16.57 % |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum | Persentase capaian mutu 100% |

| | | | | Tersedia | |
|-----|---|---------------------|----------------|------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 . Buku gambar | 7,087 | 7,087 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Alat mewarnai | 7,087 | 7,087 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik | 7,087 | 7,087 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 299 | 164 | 135 | 54.85 % |
| | 5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 800 | 475 | 325 | 59.38 % |
| 2 . | Pendidikan Dasar | | | | 99.94 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 23,274 | 23,274 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 19.94 % |

| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | 99.72 % |
|--|---|---|--|---|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 . Buku teks pelajaran | 23,274 | 23,274 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Perlengkapan belajar | 23,274 | 23,274 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 252 | 252 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 11 | 11 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | 1,708 | 1,708 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan biaya personil peserta didik | 23,274 | 23,274 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 1,909 | 1,874 | 35 | 98.17 % |
| | 8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 252 | 251 | 1 | 99.60 % |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|----------|
| 3 . | Pendidikan Kesetaraan | | | | 98.31 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,837 | 4,837 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 18.31 % |
| | | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | 91.56 % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 . Modul belajar | 4,837 | 4,837 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 106 | 106 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan biaya personil peserta didik | 4,837 | 4,837 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 247 | 146 | 101 | 59.11 % |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|----------|
| | 5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 15 | 13 | 2 | 86.67 % |
| | 6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Perlengkapan belajar | 4,837 | 4,837 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . PKBM Terakreditasi minimal C | 15 | 13 | 2 | 86.67 % |

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini terdapat pada program Alokasi Anggaran sebesar Rp. 36.086.522.925,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 30.743.191.784,00 dengan capaian sebesar 85,17%.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----|---------------------------------------|---|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | | | | 18,946,229,950 | 17,424,995,935 | 91.97 % |
| 1 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | | | | 5,105,356,900 | 4,822,685,590 | 94.46 % |
| | 1 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K20220131030517 | | | 4,159,200,000 | 4,159,200,000 | 100.00 % |
| | | 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | (enam) bulan | | | | | |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa | Peserta didik | 4,159,200,000 | 4,159,200,000 | 100.00 % | |
| | | 5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 0 | 0 | 0% | |
| | | 6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0% | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | | 4,159,200,000 | 4,159,200,000 | 100.00 % |
| | 2 | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K20220131030758 | | | | 946,156,900 | 663,485,590 | 70.12 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | 946,156,900 | 663,485,590 | 70.12% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 946,156,900 | 663,485,590 | 70.12% |
| | 3 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131030938 | | | 0 | 0 | 0.00% |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------|---|---|------|--------|
| | | | pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0% | |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini | | 0 | 0 | 0% | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 4 | Pemenuhan kualitas pendidik dan | | | 0 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456 | | | | | % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 5,105,356,900 | 4,822,685,590 | 94.46 % |
| 2 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR | | | | 8,071,728,050 | 7,075,705,895 | 87.66 % |
| | 5 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031634 | | | 333,763,500 | 333,763,500 | 100.00 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------|
| | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 333,763,500 | 333,763,500 | 100.00 % |
| | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 333,763,500 | 333,763,500 | 100.00 % |
| 6 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031749 | | | 125,075,800 | 113,417,350 | 90.68 % |
| | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 99,327,200 | 96,303,750 | 96.96 % |
| | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 25,748,600 | 17,113,600 | 66.46 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 125,075,800 | 113,417,350 | 90.68 % |
| 7 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131032010 | | | 7,593,769,550 | 6,610,567,895 | 87.05 % |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|----------|-------------------|-------------------|------------|
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 7,437,4 17,050 | 6,466,22 6,395 | 86.94 % |
| | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 156,352 ,500 | 144,341, 500 | 92.32 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 7,593,7 69,550 | 6,610,56 7,895 | 87.05 % |
| | 8 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | | 0 | 0 | 0.00 % |

| | | (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032146 | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|----|
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|----------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | | | | |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 9 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032556 | | | 19,119,200 | 17,957,150 | 93.92 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 19,119,200 | 17,957,150 | 93.92 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 19,119,200 | 17,957,150 | 93.92 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | 200 | 50 | % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 8,071,7 28,050 | 7,075,70 5,895 | 87.66 % |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN | | | | 5,769,1 45,000 | 5,526,60 4,450 | 95.80 % |
| | 10 | Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K20220321023938 | | | 5,769,1 45,000 | 5,526,60 4,450 | 95.80 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 2,113,4 45,000 | 1,870,90 4,450 | 88.52 % |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 3,655,7 00,000 | 3,655,70 0,000 | 100.0 0 % |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 5,769,1 45,000 | 5,526,60 4,450 | 95.80 % |
| | 11 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K20220321024011 | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat | Unit komunit as | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|----------|---|---|--------|
| | | | aktif dalam komunitas tersebut | | | | |
| | | 2 | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| 12 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K20220321024025 | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | | | | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| 13 | Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024044 | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan | Kegiatan | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|----------------------------------|---|---|--------|
| | | | an pendidikan inklusif | | | | |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| 14 | Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024123 | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|----------|---|---|--------|
| | | | kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |

Untuk Program Pengelolaan Pendidikan Untuk Seksi Sarana dan Prasarana PUAD, SD, & Pendidikan Kesetaraan seluruhnya sudah hampir mencapai 100% dan fisiknya semua sudah 100% terlaksana. Adapun realisasi yang tidak mencapai 100% dikarenakan memang ada sisa anggaran sisa lelang/tender. Untuk Seksi Minat Bakat SD Sudah terlaksana seluruhnya.

Untuk Seksi Tendik SD ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu kegiatan seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah ini karena terbentur dengan aturan baru yang mengharuskan seleksinya melalui guru & kepala sekolah penggerak, sedangkan di kab. HSS belum ada yang memenuhi syarat tersebut, sedangkan untuk kegiatan BOS SMP kegiatannya sebenarnya sudah terlaksana, namun untuk hasil realisasinya masih belum semua bisa di tampilkan karena menunggu update simda. Dari hasil realisasi keseluruhan itu belum semuanya dapat ditampilkan karena masih ada data yang belum update di simda, sehingga hasil realisasi program pengelolaan pendidikan masih belum memenuhi target.

4.1.5. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan :

Tabel 4.3
Personil Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

| Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Tidak termasuk Guru) | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Struktural | | | | | Fungsional | Jumlah |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Pelaksana | | |
| - | 1 | 5 | - | 30 | 47 | 83 |

| Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|--------------|
| No | Wilayah | TK | KB | TP A | SP S | PKB M | SK B | SD | SM P | Total |
| 1 | Kec. Kandungan | 25 | 22 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 9 | 50 | 349 |
| 2 | Kec. Daha Selatan | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 26 | 144 |
| 3 | Kec. Padang Batung | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85 | 24 | 137 |
| 4 | Kec. Daha Utara | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 19 | 114 |
| 5 | Kec. Simpur | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 105 |
| 6 | Kec. Angkinang | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 10 | 101 |
| 7 | Kec. Sungai Raya | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 16 | 100 |
| 8 | Kec. Telaga Langsat | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13 | 83 |
| 9 | Kec. Loksado | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 56 |
| 10 | Kec. Kalumpang | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 41 |
| 11 | Kec. Daha Barat | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 |
| | TOTAL | 132 | 103 | 5 | 10 | 7 | 7 | 644 | 187 | 1.261 |

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Belum terkoneksi data anak usia sekolah antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. HSS sehingga data yang ada hanya untuk SD dan SMP, untuk data siswa MI dan MTs menunggu dari Kementerian Agama Kab. HSS.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan (S1).
3. Tidak meratanya penyebaran guru dimana penumpukan guru di perkotaan dan guru di sekolah pinggiran masih banyak yang kurang
4. Masih ada sekolah yang kekurangan guru bidang studi, sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan guru sehingga menyebabkan terhambatnya sertifikasi.
5. Banyaknya guru yang memasuki usia pensiun dan mutasi sehingga menyebabkan kekurangan guru.
6. Kekurangan guru tersebut dapat tertutupi dengan adanya guru tenaga honor akan tetapi kadang kualifikasi guru yang mengisi tersebut tidak sesuai dengan mapel yang diampu.
7. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi
8. Faktor penghambat yang menyebabkan angka persentase PAUD yang terakreditasi masih belum memenuhi target adalah karena terbatasnya kouta dari Badan Akreditasi Nasional untuk mengikuti akreditasi lembaga PAUD.
9. Belum tercapainya target persentase partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD

▪ Solusi

1. Harus ada MoU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kab. HSS untuk saling bersinergi masalah data peserta didik.

2. Agar segera menambah SDM yang memiliki kualifikasi dan memberikan surat edaran tentang penerimaan Pendidik PAUD minimal S1 dan melakukan diklat dasar bagi yang belum S1.
3. Perlunya pemetaan guru melalui penyegaran atau roling.
4. Untuk menutupi kekurangan guru di daerah perkotaan diatasi dengan perputaran, pengangkatan guru PPPK dan atau regrouping sekolah yang memungkinkan dari segi jarak, keadaan bangunan sekolah dan jumlah siswa.
5. Harus ada guru pengganti untuk menggantikan guru yang telah pensiun yaitu dengan cara mengusulkan PPPK pada tahun berikutnya.
6. Perlunya pemetaan terhadap guru untuk menutupi kekurangan guru yang ada.
7. Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk memperoleh nilai akreditasi adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (workshop dan pendampingan)
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNF dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan memberikan pembinaan kepada lembaga secara terus-menerus yang bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka persentase PAUD formal yang terakreditasi.
9. Tenaga kependidikan yang kurang dari SMA diminta untuk sekolah Paket kesetaraan (Paket C).
10. Melakukan pembenahan pada segi sarana dan prasarana baik rehabilitasi, pembangunan maupun pengadaan alat peraga.

4.2 Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- 13) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 14) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 15) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 16) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 17) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 18) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 19) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 20) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 21) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 22) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 23) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Dan
- 24) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 4.4
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | Pernyataan Standar |
|----|---|--|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | Ibu hamil | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Ibu bersalin | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Bayi baru lahir | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Balita | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Anak pada usia pendidikan dasar | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendasarkan skrining kesehatan sesuai standar |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun | Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas | Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Penderita hipertensi | Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Penderita Diabetes Melitus | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Orang dengan TB | Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend | Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Penerima Layanan Dasar | Pernyataan Standar |
|----|--|--|--|
| | manusia (Human Immunodeficiency virus) | er, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan | mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar |

2. Mutu Layanan Dasar

Mutu layanan dasar standar pelayanan minimal urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil | <p>3) Standar Kuantitas : Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) ;</p> <p>a. Satu kali pada trimester pertama. b. Satu kali pada trimester kedua. c. Dua kali pada trimester ketiga</p> <p>4) Standar Kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi: Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Lingkar lengan Atas (LILA), Pengukuran Tinggi Fundus Uteri, Penentuan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin, Pemberian Imunisasi sesuai dengan status Imunisasi, Pemberian Tablet Tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksanaan/Penanganan Kasus dan Temu wicara (konseling)</p> |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | <p>Sesuai standar pelayanan persalinan</p> <p>1) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan - Tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang <p>2) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan</p> |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | <p>Sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>- Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal :</p> <p>1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.</p> <p>-Standar kualitas :</p> <p>1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemotongan dan perawatan tali pusat |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|----------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ▪ Injeksi vitamin K1 ▪ Pemberian salep/tetes mata antibiotic ▪ Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). <p>2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif ▪ Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM ▪ Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan injeksi vitamin K1. ▪ Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | <p>Sesuai standar pelayanan kesehatan balita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan - menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang <p>a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun dan Pemberian imunisasi dasar lengkap.</p> <p>b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun dan Pemberian Imunisasi Lanjutan.</p> <p>c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun dan Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</p> <p>d) Edukasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|--|---|
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | <p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. <p>Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah (putus sekolah)</p> |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | <p>Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif</p> <p>- Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | <p>Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut</p> <p>- Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | <p>Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas layanan kesehatan, edukasi Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan bila di perlukan b). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c). Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d). Melakukan rujukan jika diperlukan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | <p>Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus</p> <p>-Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Layanan Dasar |
|----|--|---|
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Sesuai standar pelayanan kesehatan terduga TB -Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) | -Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining - Kelompok orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu : Ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, Penjaja Seks, LSL, Transgender/Waria, pengguna Napza Suntik dan Warga binanaan Masyarakat |

3. Target Pencapaian SPM

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar. Berikut adalah tabel mengenai SPM dengan jenis layanan dasar.

Tabel 4.6
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | |
| 1 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Yang Harus Dilayani |
| | | 3,614 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) | 385 |
| | 2 . Tablet tambah darah | 346,32 |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| | 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin | 3,614 |
| | 4 . Kartu ibu/rekam medis ibu | 3,614 |
| | 5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,614 |
| | 6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan | 21 |
| | 7 . Bidan | 208 |
| | 8 . Perawat | 21 |
| | JUMLAH | 357,797 |
| 2 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 3,412 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Formulir Partograf | 3,412 |
| | 2 . Kartu ibu (rekam medis) | 3,412 |
| | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,412 |
| | 4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | 21 |
| | 5 . Bidan | 208 |
| | 6 . Perawat | 21 |
| | JUMLAH | 10,486 |
| 3 . | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 3,407 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Vaksin Hepatitis B0 | 3,407 |
| | 2 . Vitamin K1 injeksi | 3,407 |
| | 3 . Salep/tetes mata antibiotik | 3,407 |
| | 4 . Formulir bayi baru lahir | 3,407 |
| | 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | 10,494 |
| | 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,407 |
| | 7 . Dokter/dokter spesialis Anak | 21 |
| | 8 . Bidan | 208 |
| | 9 . Perawat | 21 |
| | JUMLAH | 27,779 |
| 4 . | Pelayanan Kesehatan Balita | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 15,726 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |

| | | Jumlah yang harus dilayani |
|-----|--|-------------------------------------|
| | 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | 15,726 |
| | 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | 15,726 |
| | 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | 15,726 |
| | 4 . Vitamin A Biru | 3,148 |
| | 5 . Vitamin A Merah | 22,552 |
| | 6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella | 720 |
| | 7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella | 3,6 |
| | 8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | 7,2 |
| | 9 . Peralatan Anafilaktik | 21 |
| | 10 . Bidan | 208 |
| | 11 . Dokter | 21 |
| | 12 . Perawat | 21 |
| | 13 . Ahli Gizi | 21 |
| | 14 . Guru PAUD | 11 |
| | 15 . Kader Kesehatan | 148 |
| | JUMLAH | 84,849 |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 33,568 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Buku raport kesehatanku | 33,568 |
| | 2 . Buku pemantauan kesehatan | 33,568 |
| | 3 . Kuesioner skrining kesehatan | 33,568 |
| | 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | 395 |
| | 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | 10 |
| | 6 . Dokter/Dokter gigi | 21 |
| | 7 . Bidan | 208 |
| | 8 . Perawat | 63 |
| | 9 . Ahli Gizi | 21 |
| | 10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 |
| | 11 . Guru | 395 |
| | 12 . Kader Kesehatan | 441 |
| | JUMLAH | 102,279 |

| | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 145,633 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 |
| | 2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes | 21 |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 145,633 |
| | 4 . Dokter | 21 |
| | 5 . Bidan | 148 |
| | 6 . Perawat | 63 |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | 148 |
| | JUMLAH | 146,097 |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 32,996 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | 32,996 |
| | 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | 21 |
| | 3 . Buku kesehatan lansia | 32,996 |
| | 4 . Dokter | 21 |
| | 5 . Bidan | 148 |
| | 6 . Perawat | 21 |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | 148 |
| | JUMLAH | 66,393 |
| 8 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | |

| | | |
|------|--|-------------------------------------|
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 61,418 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 |
| | 2 . Tensimeter | 21 |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 61,418 |
| | 4 . Dokter | 21 |
| | 5 . Bidan | 148 |
| | 6 . Perawat | 63 |
| | 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 |
| | JUMLAH | 61,713 |
| 9 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,674 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet | 4,674 |
| | 2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 4,674 |
| | 3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 |
| | 4 . Dokter | 21 |
| | 5 . Bidan | 148 |
| | 6 . Perawat | 63 |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 |
| | JUMLAH | 9,643 |
| 10 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 577 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |

| | | |
|------|--|-------------------------------------|
| | 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | 21 |
| | 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi | 21 |
| | 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | 577 |
| | 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 577 |
| | 5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya | 21 |
| | JUMLAH | 1,217 |
| 11 . | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,104 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | 4,104 |
| | 2 . Reagen Zn TB | 21 |
| | 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | 4,104 |
| | 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering | 4,104 |
| | 5 . Catridge tes cepat molekuler | 3 |
| | 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan | 21 |
| | 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | 21 |
| | 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru | 21 |
| | 9 . Perawat | 42 |
| | 10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 21 |
| | 11 . Penata Rontgen | 2 |
| | 12 . Tenaga kesehatan masyarakat | 21 |
| | 13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai | 148 |
| | JUMLAH | 12,633 |
| 12 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,355 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) | 4,355 |
| | 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama | 4,355 |
| | 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | 4,355 |
| | 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | 4,355 |
| | 5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | 21 |
| | 6 . Perawat | 21 |
| | 7 . Bidan | 21 |
| | 8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) | 21 |
| | 9 . Tenaga kesehatan masyarakat | 21 |
| | 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 21 |
| | JUMLAH | 17,546 |
| | | |

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|--|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | TUNTAS UTAMA | | | 94.37 % |
| 1 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | 91.65 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 71.65 % |
| | | Yang Harus | Yang Terlayani | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | Dilayani | | | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 3,614 | 3,237 | 377 | 90% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) | 385 | 385 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Tablet tambah darah | 346,32 | 346,32 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin | 3,614 | 3,614 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Kartu ibu/rekam medis ibu | 3,614 | 3,614 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,614 | 3,614 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Bidan | 208 | 208 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 357,797 | 357,797 | 0 | 800.00 % |
| 2 . | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | 98.76 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 78.76 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 3,412 | 3,359 | 53 | 98% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Formulir Partograf | 3,412 | 3,412 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Kartu ibu (rekam medis) | 3,412 | 3,412 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,412 | 3,412 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | 4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Bidan | 208 | 208 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 10,486 | 10,486 | 0 | 600.00 % |
| 3 . | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | 98.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 78.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 3,407 | 3,322 | 85 | 98% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Vaksin Hepatitis B0 | 3,407 | 3,407 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Vitamin K1 injeksi | 3,407 | 3,407 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Salep/tetes mata antibiotik | 3,407 | 3,407 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Formulir bayi baru lahir | 3,407 | 3,407 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | 10,494 | 10,494 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 3,407 | 3,407 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Dokter/dokter spesialis Anak | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Bidan | 208 | 208 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 27,779 | 27,779 | 0 | 900.00 % |
| 4 . | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | 85.93 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 65.93 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 15,726 | 12,96 | 2,766 | 82% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang | Jumlah yang | Jumlah yang | 100.00 % |

| | | harus dilayani | terlayani | belum terlayani | |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | 15,726 | 15,726 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | 15,726 | 15,726 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | 15,726 | 15,726 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Vitamin A Biru | 3,148 | 3,148 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Vitamin A Merah | 22,552 | 22,552 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella | 720 | 720 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB - Hib, Campak, Rubella | 3,6 | 3,6 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | 7,2 | 7,2 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Peralatan Anafilaktik | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Bidan | 208 | 208 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Dokter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Ahli Gizi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Guru PAUD | 11 | 11 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Kader Kesehatan | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 84,849 | 84,849 | 0 | 1,500.00 % |
| 5 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | 97.15 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 79.39 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 33,568 | 33,312 | 256 | 99% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 17.76 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 88.79 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | 1 . Buku raport kesehatanku | 33,568 | 11 | 22,568 | 32.77 % |
| | 2 . Buku pemantauan kesehatan | 33,568 | 11 | 22,568 | 32.77 % |
| | 3 . Kuesioner skrining kesehatan | 33,568 | 33,568 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | 395 | 395 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Dokter/Dokter gigi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Bidan | 208 | 208 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Perawat | 63 | 63 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Ahli Gizi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Guru | 395 | 395 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Kader Kesehatan | 441 | 441 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 102,279 | 57,143 | 45,136 | 1,065.54 % |
| 6 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | | | 89.96 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 69.96 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 145,633 | 127,347 | 18,286 | 87% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | Kapas Alkohol, KIT IVA Tes | | | | |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 145,633 | 145,633 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Dokter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Bidan | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 63 | 63 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 146,097 | 146,097 | 0 | 900.00 % |
| 7 . | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | 85.84 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 65.84 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 32,996 | 27,154 | 5,842 | 82% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | 32,996 | 32,996 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Buku kesehatan lansia | 32,996 | 32,996 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Dokter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | 5 . Bidan | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 66,393 | 66,393 | 0 | 900.00 % |
| 8 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | 93.46 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 73.46 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 61,418 | 56,399 | 5,019 | 92% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Tensimeter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 61,418 | 61,418 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Dokter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Bidan | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 63 | 63 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 61,713 | 61,713 | 0 | 700.00 % |
| 9 . | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang | 4,674 | 4,674 | 0 | 100% |

| | | | | | |
|------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| | Harus Dilayani : | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet | 4,674 | 4,674 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | 4,674 | 4,674 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Dokter | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Bidan | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 63 | 63 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Ahli Gizi | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 9,643 | 9,643 | 0 | 800.00 % |
| 10 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | | 95.69 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 79.31 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 577 | 572 | 5 | 99% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 16.38 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 81.90 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | | | | |
| | 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi | 21 | 2 | 19 | 9.52 % |
| | 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | 577 | 577 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | 577 | 577 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 1,217 | 1,198 | 19 | 409.52 % |
| 11 . | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | 99.73 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 79.73 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,104 | 4,09 | 14 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | 4,104 | 4,104 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Reagen Zn TB | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | 4,104 | 4,104 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering | 4,104 | 4,104 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Catridge tes cepat molekuler | 3 | 3 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Formulir pencatatan dan | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | pelaporan | | | | |
| | 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Perawat | 42 | 42 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Penata Rontgen | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Tenaga kesehatan masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai | 148 | 148 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 12,633 | 12,633 | 0 | 1,300.00 % |
| 12 . | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | | 96.27 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 76.27 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | | 4,355 | 4,152 | 203 | 95% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) | 4,355 | 4,355 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama | 4,355 | 4,355 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan | 4,355 | 4,355 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|----------|
| | Jarum Sesuai | | | | |
| | 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | 4,355 | 4,355 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Perawat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Bidan | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Tenaga kesehatan masyarakat | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 17,546 | 17,546 | 0 | 100.00 % |

Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Adapun total anggaran yang disediakan untuk pencapaian target-target SPM di tahun 2021 sebesar Rp. 7.986.743.050,00,-

Hasil realisasi anggaran untuk pelaksanaan pencapaian terhadap 12 (dua belas) indikator SPM kesehatan dari seluruh kegiatan ditahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.066.795.320,00,- atau 81.19 % dari total anggaran Rp. 7.986.743.050,00,- dan termasuk kategori pencapaian kinerja baik.

Tabel 4.8

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

| N o | PROGR AM | KEGIAT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|---|--|--------------|--------|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | | | | 7,986,743,050 | 7,066,795,320 | 88.48 % |
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 7,986,743,050 | 7,066,795,320 | 88.48 % |
| | 1 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | | | 7,986,743,050 | 7,066,795,320 | 88.48 % |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|---------------|---------------|---------|
| | | UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K20220131032750 | | | | | |
| | | 1 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil | Orang | 1,950,947,000 | 1,616,200,550 | 82.84 % |
| | | 2 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin | Orang | 314,516,100 | 243,034,400 | 77.27 % |
| | | 3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir | Orang | 204,722,100 | 198,155,200 | 96.79 % |
| | | 4 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita | Orang | 1,949,735,150 | 1,848,491,000 | 94.81 % |
| | | 5 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Orang | 1,167,124,650 | 1,079,596,450 | 92.50 % |
| | | 6 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif | Orang | 985,812,750 | 845,315,075 | 85.75 % |
| | | 7 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada | Orang | 511,866,100 | 493,360,350 | 96.38 % |

| | | | Usia Lanjut | | | | |
|--|--|----|--|---------|-------------|-------------|---------|
| | | 8 | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | Orang | 70,855,000 | 50,865,000 | 71.79 % |
| | | 9 | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Orang | 459,160,500 | 379,413,875 | 82.63 % |
| | | 10 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Orang | 90,829,800 | 77,825,750 | 85.68 % |
| | | 11 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Orang | 163,893,900 | 127,471,300 | 77.78 % |
| | | 12 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Orang | 117,280,000 | 107,066,370 | 91.29 % |
| | | 13 | Pengelolaan pelayanan kesehatan | Dokumen | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----|---|---------|---------------|---------------|--------|
| | | | n bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | |
| | | 14 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 7,986,743,050 | 7,066,795,320 | 88.48% |
| JUMLAH PROGRAM | | | | | 7,986,743,050 | 7,066,795,320 | 88.48% |

4.2.4 Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan :

Tabel 4.9
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan golongan

| DATA PEGAWAI | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|------------|--------------|-----|-------------|-----|--------|
| Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | |
| SD | SLTP | SLTA | D I /D III | D IV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| 1 | 4 | 48 | 435 | 57 | 108 | 19 | - | 672 |
| Kualifikasi Pangkat dan Golongan | | | | | | | | |
| Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Jumlah |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|----|--------|-----|--|
| 2 | | 138 | | 502 | | 29 | | 671 | |
| Struktural | | | | | Fungsional | | Jumlah | | |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Jumlah | | | | | |
| - | 1 | 4 | 55 | 60 | 613 | | 673 | | |

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Semua ibu hamil sudah diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan tapi untuk kunjungan sampai ke K4 terkendala karena masih adanya ibu hamil yang mengalami keguguran dan melahirkan di usia 7 bulan/prematur sehingga untuk capaian pelayanan antenatal care sesuai standar tidak mencapai target
2. Masih adanya persalinan dengan bidan kampung di daerah sulit seperti di kecamatan loksado
3. Adanya kematian bayi Usia 0 -28 hari sebanyak 36 bayi dan ada BBLR yang tidak bisa diberikan Hb0 sebanyak 23 orang dikarenakan BB nya di bawah 2000 gr
4. Kegiatan posyandu pada masa pandemi tidak maksimal berjalan sehingga balita tidak datang untuk bertimbang
5. pada masa pandemi ada sebagian sekolah tidak melakukan PTM sehingga ada 0.57% anak sekolah tidak mendapatkan skrining pelayanan Kesehatan
6. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining FR PTM masih rendah
7. Partisipasi Masyarakat berkurang untuk datang ke Fasilitas Kesehatan di sebabkan Pandemi Covid-19
8. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait penyakit Menular dan Tidak Menular.

▪ Solusi

1. Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan ibu hamil resti agar tidak terjadi persalinan premature
2. Kemitraan dan komintmen dengan kepala desa pada saat lokmin lintas sektor dan kemitraan dengan Bidan Kampung.
3. Pendampingan /kunjungan rumah pada bayi resti.
4. Melakukan sweeping ke rumah balita yang tidak datang ke posyandu
5. Berkoordinasi dengan pihak sekolah agar bagi peserta didik yang tidak datang untuk melakukan janji temu dengan pihak puskesmas agar dilakukan skrining Kesehatan.
6. Melakukan sosialisasi dan KIE terkait pentingnya pemeriksaan FR PTM di Posbindu
7. Untuk memenuhi target kinerja di tengah pandemi covid-19 ini maka dilakukan kegiatan kunjungan rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan
8. Melakukan KIE terkait Penyakit menular dan Tidak Menular.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri

dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam Permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 4) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Target pencapaian SPM Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait sektor air limbah domestik adalah :

- 1) Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman.
- 2) Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun 2022 sebesar 100%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2022 terkait Sektor Air Limbah domestik adalah universal aksek air limbah domestik sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik baik berupa on site maupun off site sistem.

Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|--|---|----------------|---------------------|
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari | Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) | 100% | Setiap Tahun |

| | | | | |
|---|--|---|------|--------------|
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase rumah tangga/KK yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik (SPALD) Dasar | 100% | Setiap Tahun |
|---|--|---|------|--------------|

4.3.3 Realisasi

a. Penyediaan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari.

Pencapaian SPM Air Minum Tahun Anggaran 2022 dengan indikatornya Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah 95 %. Capaian ini diperoleh dari jumlah akses air minum Jaringan Perpipaan sebanyak 53.284 KK. Jaringan Perpipaan disini termasuk SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi dari PDAM dan SPAM Perdesaan baik berupa Instalasi Sumur Bor Dalam, Instalasi Pengolahan Air Mini dan Penangkap Mata Air (Broncaptering). Sedangkan untuk rumah tangga yang belum terlayani SPAM Jaringan perpipaan masih ada sekitar 3.012 KK. Total rumah tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2022 adalah sebanyak 56.296 Kepala Keluarga. Selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2022

| No | Kecamatan | Target | Realisasi | | |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | Total | Terlayani JP | Terlayani BJP | Belum Terlayani |
| | | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit rumah) | (Unit rumah) |
| 1 | Angkinang | 5225 | 4315 | 892 | 18 |
| 2 | Daha Barat | 1359 | 900 | 252 | 207 |
| 3 | Daha Selatan | 8393 | 6355 | 1516 | 522 |
| 4 | Daha Utara | 5939 | 3611 | 1552 | 776 |
| 5 | Kalumpang | 1969 | 974 | 743 | 252 |
| 6 | Kandangan | 13573 | 8690 | 3988 | 895 |
| 7 | Loksado | 2313 | 917 | 1161 | 235 |
| 8 | Padang Batung | 5883 | 3263 | 2327 | 293 |
| 9 | Simpur | 4134 | 2886 | 1049 | 199 |
| 10 | Sungai Raya | 4793 | 3073 | 1611 | 109 |
| 11 | Telaga Langsung | 2715 | 1469 | 679 | 567 |
| TOTAL | | 56.296 | 36.453 | 15.770 | 4.073 |
| Persentase Layanan | | | 64,75 | 28,01 | 7,23 |
| Capaian SPM | | | 95% | | |

Keterangan :

JP adalah Jaringan Perpipaan

BJP adalah Bukan Jaringan Perpipaan

b. Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik

Pencapaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk SPM Air Limbah

yaitu Penyediaan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2022 adalah sebesar 85,42 %. Total rumah tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2022 adalah sebanyak 56.296 kepala keluarga, dengan asumsi 1 KK sama dengan 4 Jiwa. Sebanyak 47.087 rumah tangga (KK) telah mendapatkan pelayanan air limbah domestik dasar baik berupa cubluk dan atau tangki septik. Sementara itu masih terdapat sekitar 1.564 rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah sehingga terindikasi masih melakukan BABS. Ada juga rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah akan tetapi selama itu mereka masih dapat menggunakan sarana air limbah milik keluarga atau tetangga ataupun sarana air limbah umum (WC Umum) maka terhitung telah mendapatkan akses air limbah sharing sebanyak 5.327 kepala keluarga.

Tabel 4.12
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2022

| No | Kecamatan | Target | | | | Realisasi | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Total | Akses Dasar | Akses Aman SPALD-S | Akses Aman SPALD-T | Tanpa Akses | JSP | JSSP | Sharing | Akses Dasar (JSP + JSSP + Sharing) | Akses Layak (JSP+JSSP) | Akses Aman SPAL-S (JSP) | Akses Aman SPAL-T |
| | | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) | (Unit Rumah) |
| 1 | Simpur | 4134 | 3786 | 3754 | 75 | 0 | 3786 | 323 | 25 | 4134 | 4109 | 3786 | 75 |
| 2 | Sungai Raya | 4793 | 4072 | 4070 | 329 | 51 | 4307 | 432 | 3 | 4742 | 4739 | 4307 | 329 |
| 3 | Angkinang | 5225 | 3712 | 3712 | 127 | 189 | 4263 | 773 | 0 | 5036 | 5036 | 4263 | 127 |
| 4 | Kalumpang | 1969 | 1013 | 1013 | 0 | 102 | 1511 | 356 | 0 | 1867 | 1867 | 1511 | 0 |
| 5 | Kandangan | 13573 | 10645 | 10638 | 583 | 592 | 12066 | 854 | 61 | 12981 | 12920 | 12066 | 583 |
| 6 | Padang Batung | 5883 | 4274 | 4006 | 75 | 338 | 4716 | 714 | 115 | 5545 | 5430 | 4716 | 75 |
| 7 | Telaga Langsat | 2715 | 1982 | 1982 | 0 | 163 | 2068 | 458 | 26 | 2552 | 2526 | 2068 | 0 |
| 8 | Loksado | 2313 | 598 | 598 | 0 | 634 | 1516 | 49 | 114 | 1679 | 1565 | 1516 | 0 |
| 9 | Daha Selatan | 8393 | 2276 | 2116 | 75 | 3324 | 3562 | 1392 | 122 | 5076 | 4947 | 3562 | 75 |
| 10 | Daha Utara | 5939 | 1869 | 1869 | 300 | 1954 | 3002 | 937 | 46 | 3985 | 3939 | 3002 | 300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 11 | Daha Barat | 1359 | 53 | 53 | 0 | 859 | 449 | 51 | 0 | 500 | 500 | 449 | 0 |
| Total | | 56296 | 56296 | 56296 | 34280 | 8206 | 41246 | 6339 | 512 | 48097 | 47578 | 41246 | 1564 |
| Persentase Layanan | | | | | | | | | | 85,44% | 84,51% | 73,27% | 2,78% |
| Capaian SPM Akses Dasar | | | | | | | | | | 85,44% | | | |

Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | TUNTAS UTAMA | | | 90.59 % |
| 1 . | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | | | | 93.82 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 75.72 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 56,296 | 53,284 | 3,012 | 95% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 18.10 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 90.51 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 225,184 | 213,136 | 12,048 | 94.65 % |
| | 2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) | 225,184 | 151,764 | 73,42 | 67.40 % |
| | 3 . Jaringan perpipaan | 151,764 | 151,764 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Jaringan bukan perpipaan | 61,076 | 61,076 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 663,208 | 577,74 | 85,468 | 362.05 % |
| 2 . | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | | | | 87.37 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 68.34 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 56,296 | 48,09 | 8,206 | 85% |

| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 19.03 % | |
|--|---------|--|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 95.14 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | 1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik | 225,184 | 192,36 | |
| 2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik | 56,296 | 48,09 | 8,206 | 85.42 % | |
| 3 . Sub-Sistem pengolahan setempat | 730 | 730 | 0 | 100.00 % | |
| 4 . Sub-sistem pengangkutan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| 5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | |
| 6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL) | 991 | 991 | 0 | 100.00 % | |
| JUMLAH | 283,203 | 242,173 | 41,03 | 570.84 % | |

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----|--|--|--|-------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | | | | 22,925,940,036 | 22,837,342,745 | 99.61 % |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 11,917,191,036 | 11,863,659,705 | 99.55 % |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558 | | | 11,917,191,036 | 11,863,659,705 | 99.55 % |
| | | 1 | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | Liter/Detik | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | SR | 11,517,905,464 | 11,465,923,813 | 99.55 % |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|---------------------|---|---|----|
| | | 5 | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | Liter/Detik | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | | 0 | 0 | 0% |
| | | 7 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | SR | 0 | 0 | 0% |
| | | 8 | Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | | 0 | 0 | 0% |
| | | 9 | Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum | | 0 | 0 | 0% |
| | | 10 | Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri | Badan Usaha | 0 | 0 | 0% |
| | | 11 | Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat | Kelompok Masyarakat | 0 | 0 | 0% |
| | | 12 | Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM | Unit | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | 13 | Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 14 | Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM | | 0 | 0 | 0% |
| | | 15 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 16 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan | Unit | 399,285,572 | 397,735,892 | 99.61 % |
| | | 17 | Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% |
| | | 18 | Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | | 0 | 0 | 0% |
| | | 19 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | | 0 | 0 | 0% |
| | | 20 | Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 21 | Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------|---------|----|
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 11,917,191,036 | 11,863,659,705 | 99.55 % | |
| | JUMLAH PROGRAM | | | 11,917,191,036 | 11,863,659,705 | 99.55 % | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | 11,008,749,000 | 10,973,683,040 | 99.68 % | |
| | 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234 | | 11,008,749,000 | 10,973,683,040 | 99.68 % | |
| | | 1 | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi / peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|-----------------|-------------|-------------|---------|
| | | 4 | Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Pembangunan/penyediaan n sub sistem pengolahan setempat | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% |
| | | 7 | Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | | 8 | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | 0 | 0 | 0% |
| | | 9 | Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 10 | Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | 448,140,000 | 426,060,240 | 95.07 % |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | 11 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman | | 0 | 0 | 0% | |
| | | 12 | Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman | Orang | 10,560,609,000 | 10,547,622,800 | 99.88 % | |
| | | 13 | Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | Unit | 0 | 0 | 0% | |
| | | 14 | Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Dokumen | 0 | 0 | 0% | |
| | | 15 | Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% | |
| | | 16 | Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT | Rumah Tangga | 0 | 0 | 0% | |
| | | 17 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT | Dokumen | 0 | 0 | 0% | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | | 11,008,749,00 | 10,973,683,04 | 99.68 % |

| | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | 0 | 0 | |
| | JUMLAH PROGRAM | 11,008,749,00 0 | 10,973,683,04 0 | 99.68 % |

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan

| No. | Uraian | JUMLAH PEGAWAI/ORANG | | | | | PENDIDIKAN | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|----|
| | | G O L I V | G O L II | G O L I | NON PNS | S D | SLT P | SL TA | D-3 | S-1 | S-2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | PNS/Struktural Administrasi | 3 | 33 | 13 | - | - | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | 3 |
| 2 | PNS/Struktural Administrasi UPT | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NON PNS | - | - | - | - | - | | | 24 | 5 | 14 | - |
| | Jumlah | 3 | 33 | 13 | - | - | 0 | 1 | 31 | 14 | 40 | 3 |

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan Air Minum:

1. Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dengan kepadatan penduduk masih kecil sehingga membutuhkan investasi besar jaringan perpipaan.
2. Topografi pegunungan di kecamatan Loksado dan Padang Batung menyulitkan akses PDAM untuk masuk sehingga diperlukan investasi yang besar untuk memenuhi akses SPAM Jaringan Perpipaan PDAM di lokasi tersebut.
3. Biaya bulanan PDAM bagi sebagian masyarakat masih menjadi faktor keengganan memasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum meski gratis.

Permasalahan Air Limbah :

1. Topografi rawa pada tiga Kecamatan seperti Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan merupakan daerah rawa pasang surut cukup menyulitkan instalasi tangki septik pabrikan. Sementara itu tiga kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) tertinggi dibanding kecamatan lain.
2. *Mindset* dan *culture set* masyarakat yang pada umumnya masih belum bisa terlepas dari sungai sebagai pusat aktifitas rumah tangga seperti untuk keperluan minum, mandi sekaligus buang air.

▪ Solusi

1. Konsistensi dan sinergisitas pendanaan kegiatan dari APBD, DAK Sanitasi dan DAK Air Minum dan APBN Pamsimas dan Sanimas tetap menjadi solusi utama.
2. Sinkronisasi penanganan dan penentuan lokus dari berbagai sumber dana tersebut dan kerja sama antara Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dibawah koordinasi Bappelitbangda merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan angka SPM air Minum dan Air Limbah secara signifikan .
3. Pemicuan PHBS bersama Dinkes menjadi faktor penentu SPM air minum dan air limbah, serta dengan pemilihan lokasi dan kebutuhan yang lebih baik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah). Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Pencapaian |
|----|--|---|----------------|------------------------|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Setiap Tahun |
| 2 | Fasilitasi penyediaan | Jumlah Warga Negara yang | 100% | Setiap Tahun |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Pencapaian |
|----|--|---|----------------|------------------------|
| | rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni | | |

4.4.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | Total Pencapaian | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | 100.00 % | | |
| 1 . | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | 20.00 % | | |
| | | Tidak Terjadi Bencana | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang Belum terlayani | 0.00 % |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | 100.00 % | | |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang Belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Bantuan akses rumah | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | sewa layak huni bagi korban bencana | | | | |
| | 2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 2 . | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Subsidi uang sewa | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|-------------|
| | rumah layak huni | | | | % |
| | JUMLAH | 3 | 3 | 0 | 300.00 % |

Rumusan penilaian capaian realisasi sebagaimana indikator yang telah ditetapkan adalah :

- a. Indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dihitung sebanyak 0 (nol) karena tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah dan tidak memerlukan relokasi akibat kejadian bencana, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 0 (nol) dibagi dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani sebanyak 0 (nol), jadi nilainya adalah tak terdefiniskan dan dilaporkan sebagai 100%.
- b. Indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dihitung sebanyak 3 (tiga) karena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atau penguasaan tanah dan atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 3 (tiga) dibagi dengan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria pelayanan sebanyak 3 (tiga), jadi nilainya adalah dilaporkan sebagai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana, diperoleh data rumah tangga pada 5 (lima) desa pada Tahun Anggaran 2021 dan 3 (tiga) desa pada Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Loksado, yang dikategorikan sebagai rumah tangga pada daerah rawan bencana, dengan hasil data sebagai berikut:

1. Desa Loksado : jumlah 127 unit rumah (2021)
2. Desa Hulubanyu : jumlah 152 unit rumah (2021)
3. Desa Tumingki : jumlah 123 unit rumah (2021)
4. Desa Lok Lahung : jumlah 24 unit rumah (2021)
5. Desa Haratai : jumlah 91 unit rumah (2021)
6. Desa Ulang : jumlah 15 unit rumah (2022)
7. Desa Malinau : jumlah 22 unit rumah (2022)
8. Desa Pangungan : jumlah 18 unit rumah (2022)
- Jumlah terdata : 572 unit rumah

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

Pada tahun anggaran 2022, melalui APBD telah disediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.139.800,00,- pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan identifikasi ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana salah satu langkah awal penerapan SPM adalah dengan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana.

Tabel 4.18
Realisasi Capaian Program Pengembangan Perumahan

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----|--------------------------------|---|---|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | | | | 123,139,800 | 105,225,000 | 85.45 % |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 123,139,800 | 105,225,000 | 85.45 % |
| | 1 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034637 | | | 123,139,800 | 105,225,000 | 85.45 % |
| | | 1 | Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 71,299,950 | 63,695,000 | 89.33 % |
| | | 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana | Dokumen | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------|-------------|---------|
| | 5 | Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 6 | Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus | Dokumen | 51,839,850 | 41,530,000 | 80.11 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 123,139,800 | 105,225,000 | 85.45 % |
| 2 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034753 | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Unit Rumah | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | Ha | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Unit Rumah | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|------------|-------------|-------------|---------|
| | | 5 | Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | Unit Rumah | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota | Unit Rumah | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 123,139,800 | 105,225,000 | 85.45 % |

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan

| DATA PEGAWAI | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------|--------|
| Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | |
| SD | SLTP | SLTA | D I /D III | D IV | S- 1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| 8 | 15 | 35 | 8 | 1 | 16 | 6 | - | 89 |
| Kualifikasi Pangkat dan Golongan | | | | | | | | |
| Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Jumlah |
| 17 | | 35 | | 34 | | 3 | | 89 |
| Struktural | | | | | Fungsional | | Jumlah | |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Jumlah | | | | |
| - | 1 | 3 | - | 4 | 85 | | 89 | |

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Pada program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh tidak tercapainya target untuk meningkatkan persentase rumah layak huni disebabkan oleh adanya perubahan program dalam peningkatan kualitas RTLH(BSPD/DAK) pada kementerian.

- Solusi

Solusi yang direncanakan dan mulai dilaksanakan adalah Mengupayakan tambahan usulan peningkatan RTLH kepada kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan untuk juknis ke lima jenis pelayanan tersebut adalah :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.
- Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Meliputi :
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 2. penyusunan kajian risiko bencana Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
 3. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 5. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 6. pembuatan rencana kontinjensi;
 7. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 8. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 9. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 10. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 12. respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabahzoonosis prioritas;
 13. respon cepat darurat bencana;
 14. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 15. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 16. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada table berikut :

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 480 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 1 |
| | 2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 1 |
| | 3 . Standar operasional prosedur Satpol PP | 6 |
| | 4 . Standar sarana prasarana Satpol PP | 44 |
| | 5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | 78 |
| | 6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 1 |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | |
| 1 . | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 1 |
| | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 1 |
| | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | 4 |
| | 4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana | 1 |
| | 5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana | 178,628 |

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 2 . | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total |
| | | Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana | 43 |
| | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | 4 |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total |
| | | Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 38 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 3 |
| | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 38 |
| | 3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana | 38 |
| | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas | 2 |
| | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 38 |
| 1 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total |
| | | Yang Harus Dilayani |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 42 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |

| | | |
|--|--|--|
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan |
| | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi | 28 |
| | 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 2 |
| | 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 32 |
| | 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia | 10 |

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.20
Realisasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(TRANTIBUM)

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | TUNTAS PARIPURNA | | | 100.00 % |
| 1 . | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 480 | 480 | 0 | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | 100.00 % |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | 2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Standar operasional prosedur Satpol PP | 6 | 6 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Standar sarana prasarana Satpol PP | 44 | 44 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | 78 | 78 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | | |
| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
| -1 | -2 | -3 | | | -4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | TUNTAS PARIPURNA | |
| | | | | 100.00 % | |
| 1 . | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 | 178,628 | 0 | 100.00 % |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % | |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | 100.00 % |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | 4 | 4 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana | 178,628 | 178,628 | 0 | 100.00 % |
| 2 . | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 178,628 | 178,628 | 0 | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | 100.00 % |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana | 43 | 43 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | 4 | 4 | 0 | 100.00 % |
| 3 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | | | | 100.00 % |
| | Ya Terjadi Bencana | | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus | Yang Terlayani | Terlayani | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | | Dilayani | ni | | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 38 | 38 | 0 | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | 100.00 % |
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 3 | 3 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 38 | 38 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana | 38 | 38 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 38 | 38 | 0 | 100.00 % |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | | | | |
| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
| -1 | -2 | -3 | | | -4 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | TUNTAS PARIPURNA | | | 100.00 % |
| 1 . | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : | 42 | 42 | 0 | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |

| | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | Jumlah Mutu Barang / | 100.00 % |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | | Jasa Yang Dibutuhkan | Jasa Yang Tersedia | Jasa Yang Belum Tersedia | |
| | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi | 28 | 28 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 32 | 32 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah.

- Untuk urusan Trantibum pada tahun anggaran 2022, melalui Satpol PP dan Damkar telah disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,202,903,570 dan dapat direalisasikan sebesar 1,140,427,128 atau 94.81 %
- Untuk urusan Bencana pada tahun anggaran 2022, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,173,537,568 dan dapat direalisasikan sebesar 767,528,000 atau 65.40 %

Tabel 4.21
 Realisasi Capaian Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 (TRANTIBUM)

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----|--|---|---|--------|-----------------------------|---------------|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | | | | 2,626,195,138 | 2,110,934,701 | 80.38 % |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM) | | | | 1,202,903,570 | 1,140,427,128 | 94.81 % |
| | 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1,125,074,520 | 1,099,927,128 | 97.76 % |
| | | 1 | Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan | Kasus | 10,000,000 | 9,960,000 | 99.60 % |
| | | 2 | Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan | Kasus | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---------------|-------------|---------|
| | | | Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | | | | |
| | | 3 | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Orang | 1,007,060,750 | 983,047,128 | 97.62 % |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|------------|------------|----------|
| | 6 | Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 94,400,000 | 94,400,000 | 100.00 % |
| | 7 | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum | Unit | 13,613,770 | 12,520,000 | 91.97 % |
| | 8 | Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 9 | Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 34,219,500 | 28,770,000 | 84.07 % |
| | 1 | Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 11,742,500 | 11,400,000 | 97.08 % |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------------|-------------|----------|
| | 2 | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 22,477,000 | 17,370,000 | 77.28 % |
| | 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | 43,609,550 | 11,730,000 | 26.90 % |
| | 1 | Pengembangan kapasitas dan karier PPNS | Laporan | 43,609,550 | 11,730,000 | 26.90 % |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN) | | | 1,173,537,568 | 767,528,000 | 65.40 % |
| | 4 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | 17,000,000 | 17,000,000 | 100.00 % |
| | 1 | Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) | Orang | 17,000,000 | 17,000,000 | 100.00 % |
| | 5 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 899,960,000 | 526,920,000 | 58.55 % |

| | | Terhadap Bencana | | | | |
|--|---|--|---------|-------------|-------------|----------|
| | 1 | Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota | Orang | 33,350,000 | 33,350,000 | 100.00 % |
| | 3 | Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 104,400,000 | 104,400,000 | 100.00 % |
| | 4 | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | 5 | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 6 | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Kawasan | 0 | 0 | 0% |
| | 7 | Penanganan pasca bencana | | 378,700,000 | 8,700,000 | 2.30 % |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-------------|-------------|----------|
| | | | Kabupaten/Kota | | | | |
| | | 8 | Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota | Orang | 363,710,000 | 363,710,000 | 100.00 % |
| | | 9 | Penyusunan rencana kontijensi | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 10 | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | 19,800,000 | 16,760,000 | 84.65 % |
| | | 11 | Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 12 | Pelatihan keluarga tanggap bencana alam | | 0 | 0 | 0% |
| | 6 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 56,581,000 | 24,503,000 | 43.31 % |
| | | 1 | Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 18,000,000 | 17,903,000 | 99.46 % |
| | | 3 | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 4 | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 0 | 0% | |
| | | 5 | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | Laporan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 6 | Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit | Dokumen | 38,581,000 | 6,600,000 | 17.11 % | |
| | 7 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | 199,996,568 | 199,105,000 | 99.55 % |
| | | 1 | Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% | |
| | | 2 | Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% | |
| | | 3 | Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% | |
| | | 4 | Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem | Dokumen | 199,996,568 | 199,105,000 | 99.55 % | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|-------------|-------------|---------|
| | | | Informasi Kebencanaan | | | | |
| | | 5 | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| 3 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR) | | | | 249,754,000 | 202,979,573 | 81.27 % |
| | 8 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 57,234,200 | 35,034,573 | 61.21 % |
| | | 1 | Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 30,131,200 | 14,634,573 | 48.57 % |
| | | 3 | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non | Laporan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|------------|------------|---------|
| | | | kebakaran | | | | |
| | | 4 | Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 6 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Dokumen | 27,103,000 | 20,400,000 | 75.27 % |
| | | 7 | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 8 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Unit | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|---|---------|---|---|--------|
| | | 9 | Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | | 10 | Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 9 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | Laporan | 0 | 0 | 0% |
| | 10 | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | Dokumen | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|----|---|--|---------|-------------|-------------|---------|
| | 11 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 192,519,800 | 167,945,000 | 87.24 % |
| | | 1 | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Orang | 192,519,800 | 167,945,000 | 87.24 % |
| | | 2 | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran | | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | 12 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam | Laporan | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|---|---|----|
| | | | keselamatan manusia | | | | |
| | | 2 | Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Dokumen | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Unit | 0 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Laporan | 0 | 0 | 0% |

4.5.5 Dukungan Personel

Dukungan Personil Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2022

| DATA PEGAWAI | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
| Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | |
| SD | SLTP | SLTA | D I /D III | D IV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| 3 | 3 | 49 | 1 | - | 11 | 2 | - | 69 |
| Kualifikasi Pangkat dan Golongan | | | | | | | | |
| Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Jumlah |
| 5 | | 38 | | 23 | | 3 | | 69 |
| Struktural | | | | | Fungsional Umum | Fungsional Tertentu | Jumlah | |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | |

Sedangkan untuk bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23

Personil Badan Penanggulangan Bencana Kab.HSS Tahun 2022

| Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|--------|
| SD | SLTP | SLTA | D I /D III | D IV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| - | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 13 |
| Kualifikasi Pangkat dan Golongan | | | | | | | | |
| Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Jumlah |
| - | | 6 | | 6 | | 1 | | 13 |
| Struktural | | | | | Fungsional | | Jumlah | |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Jumlah | Tertentu | Umum | | |
| - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 13 | |

4.6 Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/ suami dan anaknya.
3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - 1) Jumlah pengungs/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- c. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS dan DTKS;

Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi
Tahun 2022

| No | Jenis PMKS | Data Eksisting Tahun 2022 | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Disabilitas Terlantar | 297 | |
| 2 | Anak Terlantar | 744 | |
| 3 | Lansia Terlantar | 948 | |
| 4 | Gelandangan dan Pengemis | 40 | |
| 5 | Data Korban Bencana | 350 | |

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.HSS

Tabel 4.25
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | |
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 297 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 297 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | 4 . Penyediaan permakanan | 297 |
| | 5 . Penyediaan sandang | 7 |
| | 6 . Penyediaan alat bantu | 77 |
| | 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 80 |
| | 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 29 |
| | 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar | 297 |

| | | |
|-----|--|---|
| | 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 297 |
| | 11 . Akses ke layanan pendidikan | 74 |
| | 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 9 |
| | 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 9 |
| | 14 . Layanan rujukan | 9 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | JUMLAH | 1,485 |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 744 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 744 |
| | 2 . Penyediaan permakanan | 20 |
| | 3 . Penyediaan sandang | 10 |
| | 4 . Penyediaan alat bantu | 10 |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 744 |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 20 |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar | 20 |
| | 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 744 |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan | 744 |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 10 |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 10 |
| | 12 . Layanan rujukan | 20 |
| | 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | JUMLAH | 3,099 |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 948 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 948 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 948 |
| | 4 . Penyediaan sandang | 205 |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 51 |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 5 |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 848 |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 848 |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 948 |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 948 |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 3 |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 3 |
| | 13 . Layanan rujukan | 5 |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | JUMLAH | 5,763 |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 40 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 40 |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 40 |
| | 4 . Penyediaan sandang | 40 |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 40 |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 40 |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 70 |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar | 40 |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak | 110 |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 23 |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 40 |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 40 |
| | 13 . Layanan rujukan | 11 |

| | | |
|-----|--|---|
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 |
| | JUMLAH | 537 |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | Ya Terjadi Bencana |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | Jumlah yang Harus Dilayani : | 350 |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | |
| | | Jumlah yang harus dilayani |
| | 1 . Penyediaan permakanan | 350 |
| | 2 . Penyediaan sandang | 350 |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 167 |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | 350 |

4.6.3 Realisasi

Realisasi capaian urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26

Realisasi Capaian Urusan Sosial

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|--|-------------------------------|----------------|------------|------------------|
| -1 | -2 | -3 | | | -4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | 100.00 % |
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus | Yang Terlayani | Terlayani | |

| | Dilayani | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| • Jumlah yang Harus Dilayani : | 297 | 297 | 0 | 100% |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| 1 . Layanan data dan pengaduan | 297 | 297 | 0 | 100.00 % |
| 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 4 . Penyediaan permakanan | 297 | 297 | 0 | 100.00 % |
| 5 . Penyediaan sandang | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| 6 . Penyediaan alat bantu | 77 | 77 | 0 | 100.00 % |
| 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 80 | 80 | 0 | 100.00 % |
| 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 29 | 29 | 0 | 100.00 % |
| 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar | 297 | 297 | 0 | 100.00 % |
| 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu | 297 | 297 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | Identitas Anak | | | | |
| | 11 . Akses ke layanan pendidikan | 74 | 74 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Layanan rujukan | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 1,485 | 1,485 | 0 | 1,500.00 % |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 744 | 744 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 744 | 744 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan permakanan | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan sandang | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan alat bantu | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 744 | 744 | 0 | 100.00 % |

| | | | | |
|--|-----|-----|---|----------|
| 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 744 | 744 | 0 | 100.00 % |
| 9 . Akses ke layanan pendidikan | 744 | 744 | 0 | 100.00 % |
| 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 10 | 10 | 0 | 100.00 % |
| 12 . Layanan rujukan | 20 | 20 | 0 | 100.00 % |
| 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | JUMLAH | 3,099 | 3,099 | 0 | 1,500.00 % |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 948 | 948 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 948 | 948 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 948 | 948 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | 205 | 205 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 51 | 51 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 848 | 848 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 848 | 848 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, | 948 | 948 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------|-------------|------------|
| | Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | | | | |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 948 | 948 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 3 | 3 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 3 | 3 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 5,763 | 5,763 | 0 | 1,500.00 % |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 40 | 40 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang | Jumlah yang | Jumlah yang | 100.00 % |

| | | harus dilayani | terlayani | belum terlayani | |
|--|--|----------------|-----------|-----------------|----------|
| | | -1 | -2 | -3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 70 | 70 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak | 110 | 110 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 23 | 23 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 40 | 40 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | 11 | 11 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | | | | |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | JUMLAH | 537 | 537 | 0 | 1,500.00 % |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 100.00 % |
| | | Ya Terjadi Bencana | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 350 | 350 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Penyediaan permakanan | 350 | 350 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan sandang | 350 | 350 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 167 | 167 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | 350 | 350 | 0 | 100.00 % |

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.27
Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2022

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----|-----------------------------|--|---|--------|-----------------------------|----|---------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 1 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 8,115,988,600 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736 | | | 8,052,624,600 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Penyediaan permakanan | Orang | 6,808,666,300 | 0 | 54.19 % |
| | | 2 | Penyediaan sandang | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | | 3 | Penyediaan alat bantu | Orang | 46,600,000 | 0 | 0% |
| | | 4 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | Orang | 108,076,950 | 0 | 28.85 % |
| | | 6 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | Orang | 20,584,750 | 0 | 9.11 % |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------------|---|----------|
| | 7 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | 8 | Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 504,239,650 | 0 | 5.95 % |
| | 9 | Pemberian layanan data dan pengaduan | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | 10 | Pemberian layanan kedaruratan | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | 12 | Pemberian layanan rujukan | Dokumen | 564,456,950 | 0 | 16.31 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 8,052,624,600 | 0 | 0.00 % |
| 2 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K20220131040943 | | | 63,364,000 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Penyediaan makanan | Orang | 32,000,000 | 0 | 97.50 % |
| | 2 | Penyediaan sandang | Orang | 31,364,000 | 0 | 100.00 % |
| | 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----|---|-------|---------------|------------|---------|
| | | 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | | 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 63,364,000 | 0 | 0.00 % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 8,115,988,600 | 0 | 0.00 % |
| KEGIATAN LAINNYA | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA | | | | | | |
| | | 1. | Pemberian Layanan Kedaruratan | | 386,316,900 | 52,675,000 | 13.64 % |
| | | 2. | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | | 0 | 0 | 0% |
| | | 3. | Pemberian layanan rujukan | | 24,682,350 | 5,450,000 | 22.08 % |
| | | 4. | Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | 394,856,000 | 68,100,000 | 17.25 |

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan golongan

| DATA PEGAWAI | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|----------------|---------|--------|
| Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | |
| SD | SLTP | SLTA | D I /D III | D IV | S- 1 | S-2 | S- 3 | Jumlah |
| - | - | 11 | 2 | - | 12 | 2 | - | 27 |
| Kualifikasi Pangkat dan Golongan | | | | | | | | |
| Golongan I | | Golongan II | | Golongan III | | Golongan IV | | Jumlah |
| - | | 4 | | 19 | | 4 | | 27 |
| Struktural | | | | | Fungsional | | Jumlah | |
| Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Jumlah | | | | |
| - | 1 | 4 | - | 5 | 22 | | 27 | |

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

1. Penyediaan Data dilakukan melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dikumpulkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan belum terdata untuk tahun 2022
2. Perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan menyesuaikan persediaan bantuan tanggap darurat bencana yang masih ada pada stock opname. Untuk penyediaan sandang pada tahun 2022 belum diakomodir dengan APBD Kabupaten karena adanya barang bantuan tanggap darurat dari Kementerian Sosial
3. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan memaksimalkan pagu anggaran daerah yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan SPM khususnya dibidang sosial, proses perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum berfokus pada target sasaran SPM dan indikator SPM atau dengan kata lain masih bersifat umum dan tidak terfokus sehingga belum semua kebutuhan untuk pemenuhan SPM dapat dianggarkan. Pada tahun selanjutnya akan kami fokuskan secara khusus perencanaan dan penganggaran terkait SPM melalui matrik perencanaan yang kami buat sehingga KPM dapat terlayani dengan baik dan maksimal. Kesulitan ini adalah dampak dari masa transisi dan penyesuaian terhadap Permendagri 90, kami terus berupaya agar pemetaan dan sinkronisasi kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
4. Belum adanya kendaraan khusus roda empat (operasional) untuk layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti.

5. Untuk tahun anggaran 2022 terjadi kesalahan pemetaan kegiatan khusus terkait penanganan bencana sehingga belum dapat dilakukan entry pada capaian realisasi kegiatan SPM pada aplikasi sesuai dengan indikator SPM yang seharusnya. Namun pelaksanaan SPM bidang Sosial khususnya penanganan bencana tetap terlaksana dengan baik. Untuk indikator SPM yang masih 0% karena tidak adanya penganggaran ataupun perencanaan maka akan terus kami lakukan evaluasi demi perbaikan layanan SPM khususnya bidang Sosial pada Dinas Sosial. Dan untuk Pagu dan Realisasi Anggaran pada pelaksanaan SPM tahun 2022 belum terpilah spesifik berdasarkan Bidang SPM yang ditangani dan hal ini tentu akan kami perbaiki ditahun-tahun mendatang.

▪ Solusi

1. Melakukan perbaikan dengan melakukan pengumpulan data terkait PPKS yang menjadi target layanan SPM pada tahun 2022
2. Perlu dianggarkan untuk pembelian kendaraan Roda empat untuk Rehabilitasi di laur Panti

BAB V

Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

A. Strategi Pencapaian SPM

a. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada jenis layanan PAUD, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.
- h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

b. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas kader
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- f. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta
- g. Penyusunan sitem pelaporan SPM yang terintegrasi
- h. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah
- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini
- j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

c. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan

Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate. Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

d. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- b. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;
- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

f. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
 - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
 - 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
- c. Penegakan peraturan perundangan:
 - 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 11 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

g. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), angka penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dinas sosial dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional
- b. Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bidang Sosial adalah:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas
- e. kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial

B. Kebijakan Pencapaian SPM

Kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan pencapaian SPM yang di tuangkan dalam RPJMD. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2018-2023 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran

dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan kata lain pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi daerah, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun SPM Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7 2018, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada VISI: “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya.

c. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu

kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VII PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi dikarenakan ada kegiatan SPM yang berhubungan dengan pelaksanaan SPM tidak diakomodir dalam APBD Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus lebih memberikan perhatian kepada penanggung jawab SPM guna peningkatan pelayanan dasar yang wajib bagi masyarakat. Selanjutnya tiap tahun laporan SPM akan selalu dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah penanggung jawab SPM, unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya untuk mencapai target yang ditentukan. Demikian Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini kami susun. Kami menyadari laporan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, semoga di masa yang akan datang penerapan SPM dapat lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan kepada Kita semua, Amin Ya Rabbal Alamiin.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI